

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi September | Tahun 2022 No. 40

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DipL.Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL

Membebani Rakyat

**Batalan Kenaikan
Harga BBM
Bersubsidi!**

MAAF CINTAKU PADAMU
TAK SETINGGI
HARGA BBM
#BATALKANKENAikan BBM
#PKSMENOLAKKAN BBM



Pancasila Sebagai Karakter Bangsa

(Bagian 1)

Bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini? Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka. Diterima sebagai kesepakatan bersama (kalimatun sawa', common denominator) oleh semua kelompok dan golongan di tubuh bangsa ini. Inilah kulminasi budaya luhur bangsa Indonesia yang digali bersama oleh tokoh-tokoh bangsa sehingga mencerminkan kualitas manusia Indonesia.

Jika ada pertanyaan apa karakter khas bangsa Indonesia? Jawabnya adalah Pancasila. Pancasila memberikan warna (corak) identitas/karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar (ground norm) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (philosophische grondslag). Konsekuensinya, Pancasila selain menjadi identitas/karakter juga menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam

bernegara.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini kemampuan Pancasila sebagai "bintang pimpinan" (leitstar). Kata Bung Karno, Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu.

Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri.

Jika ada pertanyaan apa karakter khas bangsa Indonesia? Jawabnya adalah Pancasila. Pancasila memberikan warna (corak) identitas/karakter Indonesia sebagai sebuah bangsa

Terus Suarakan Penolakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di Dapil, Diah Nurwitasari **Ikuti Flashmob**

KUTIPAN

Bandung (12/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, terus menyuarakan penolakannya terhadap naiknya harga BBM bersubsidi di Daerah Pemilihannya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (12/09).

Penolakan tersebut dilakukan bersama DPD PKS Kabupaten Bandung dengan mengadakan aksi flashmob bertempat di depan Kantor Bupati Bandung di Kecamatan Soreang.

Dalam agenda tersebut hadir Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun didampingi Anggota Legislatif yang berasal dari dapil Kabupaten Bandung baik itu tingkat kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Mereka bergantian memberikan orasi menolak kenaikan harga BBM di depan 300-an peserta aksi yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Sebagai Anggota Komisi VII DPR-RI dari Dapil Kabupaten Bandung, Diah Nurwitasari

memberikan orasi dengan suara lantang sebagaimana yang biasa dilakukan dalam sidang-sidang dan kesempatan lainnya.

"Sejak April 2022 sudah seringkali saya sampaikan kepada Pemerintah melalui kementerian ESDM, PLN maupun Pertamina agar jangan bermain-main dengan hajat hidup masyarakat. Karena menaikkan harga BBM bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas," ungkapnya.

Dampak kenaikan harga BBM, kata Diah, akan menimbulkan efek domino yang berat bagi masyarakat, karena setelah BBM naik secara otomatis ongkos transportasi akan naik, diikuti harga

kebutuhan pokok yang melambung sehingga daya beli masyarakat pun turun.

"Sebetulnya ada solusi lain bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, misalkan dengan pengetatan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan pemberhentian proyek-proyek pembangunan yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh masyarakat banyak," jelasnya.

Diah melanjutkan orasinya dan mengajak warga terus menyuarakan penolakan terhadap naiknya harga BBM bersubsidi.

"Mari terus kita suarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini hingga pemerintah mencabut kembali keputusan yang merugikan rakyat ini," tegas Diah.

Diah kemudian menutup orasinya dengan mengajak seluruh peserta flashmob menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

"Sebetulnya ada solusi lain bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, misalkan dengan pengetatan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan pemberhentian proyek-proyek pembangunan yang sebetulnya belum dibutuhkan oleh masyarakat banyak,"

Dr Salim Sambut Silaturahmi UAS

KUTIPAN

Jakarta (19/08) — Dai kondang Ustadz Abdul Somad berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf Al Jufri, di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/8/2022).

Sosok yang akrab disapa UAS itu mengaku kunjungannya ke kediaman Dr. Salim dalam rangka silaturahmi.

“Diwaktu luang saya datang berkunjung ke beliau, saya tidak ingin mengganggu waktu beliau jadi ketika beliau ada waktu luang saya berkunjung,” ucap UAS.

“Saya mencintai para habaib termasuk guru saya Sayyidi al Habib Salim Segaf Al Jufri, di dunia kami bertemu semoga di akhirat bertemu dengan datuk beliau Rasulullah SAW, mudah mudahan silaturahmi ini memperpanjang umur menambah keberkahan usia, dulu sebelum ke Sudan saya berkunjung ke beliau untuk memohon doa,” tutur UAS.

Selain itu UAS juga menyebut, peran kakek dari Dr. Salim yakni Sayyid Idrus Al Jufri dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dalam peringatan HUT RI, UAS menyebut sebagai memontum untuk mengenang

jasa para pahlawan diantaranya Sayyid Idrus Al Jufri.

“Setiap bangsa punya simbol kemuliaan dan simbol kemuliaan kita adalah merah putih, ucapan itu dari Guru Tua yang merupakan kakek dari Habib Salim, meneriakkan takbir mengajarkan kita bahwa merdeka atau mati, momentum 17 agustus menyegarkan kembali ingatan kita, saya tidak ketemu dengan Guru Tua tapi saya bertemu Habib Salim untuk mengikatkan hati, dalam saat hembusan nafas anak bangsa ini mencintai bangsa dan agamanya,” kata UAS.

Menerima kunjungan dari UAS, Dr. Salim menyebut Ustadz Abdul Somad mendapat tempat yang spesial di hati umat, Dr. Salim menyebut masyarakat menantikan dakwah dari UAS yang penuh keikhlasan dan perjuangan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

“Alhamdulillah terima kasih Ustadz Abdul Somad, UAS menempati tempat khusus di hati kita semua di hati umat, masyarakat menantikan dakwahnya dia selalu berkeliling untuk berdakwah, semoga Allah berikan taufiq hidayah dan mahabbah, kita mencintainya karena keikhlasan dan perjuangannya



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Aleg PKS Desak Pemerintah Selidiki Insiden Penembakan yang Tewaskan Nelayan Indonesia di Papua Nugini

KUTIPAN

Jakarta (27/08) — Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, mengecam insiden penembakan oleh tentara Papua Nugini yang menyebabkan seorang kapten kapal nelayan Calvin O2, bernama Sugeng asal Indonesia meninggal dunia pada Senin (22/8).

Menurut Sukamta semestinya terhadap kapal nelayan Indonesia yang dianggap melanggar wilayah Papua Nugini, pihak aparat setempat cukup memberikan tembakan peringatan.

"Langkah Kemlu untuk memanggil Plt Dubes Papua Nugini dan melayangkan nota diplomatik sudah tepat. Sudah semestinya ada protes keras dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini. Pemerintah Indonesia juga harus mendesak adanya penyelidikan atas insiden ini

karena ada indikasi pelanggaran prosedur dilakukan oleh pihak tentara Papua Nugini. Ini semua perlu dilakukan supaya tidak terjadi insiden serupa di masa yang akan datang."

Sukamta juga berharap Kemlu memberikan perhatian dan perlindungan terhadap 13 ABK dari 2 kapal nelayan yang diamankan pihak Papua Nugini. Ia meyakini nelayan-nelayan Indonesia tidak ada kesengajaan melanggar wilayah laut negara lain.

Di sisi lain Wakil Ketua

Fraksi PKS ini juga menyoroti perlunya Pemerintah memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia terutama di wilayah terluar.

Menurutnya saat ini jumlah kapal-kapal patroli masih belum memadai untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pulau-pulau terluar yang jumlahnya sangat banyak dan wilayah laut terluar yang sangat luas.

"Semakin kuatnya armada angkatan laut Indonesia tentu juga akan memberikan rasa aman kepada nelayan-nelayan Indonesia terutama di wilayah terluar. Insiden kapal nelayan Indonesia menerobos wilayah negara lain juga akan bisa dideteksi secara lebih cepat," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

"Langkah Kemlu untuk memanggil Plt Dubes Papua Nugini dan melayangkan nota diplomatik sudah tepat. Sudah semestinya ada protes keras dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini. Pemerintah Indonesia juga harus mendesak adanya penyelidikan atas insiden ini karena ada indikasi pelanggaran prosedur dilakukan oleh pihak tentara Papua Nugini. Ini semua perlu dilakukan supaya tidak terjadi insiden serupa di masa yang akan datang."

Aleg PKS Desak BNPT Perkuat FKPT untuk Pencegahan Terorisme di Daerah

KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Aceh II, M. Nasir Djamil menyinggung soal keberadaan dan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam upaya-upaya pencegahan terorisme di daerah.

Hal tersebut disampaikan saat rapat anggaran bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar, M.H., di DPR, Selasa (31/08) di Ruang Rapat Komisi III.

Nasir menyebutkan keberadaan FKPT saat ini seperti ada dan tiada, terkesan belum memberikan dampak yang berarti dalam kerja-kerja pencegahan terorisme khususnya di daerah.

“FKPT dikatakan ada tapi tak ada, dikatakan tidak ada tapi ada. Kontribusinya masih sangat minim sehingga keberadaannya belum terasa di daerah-daerah” sebut Nasir.

Lebih lanjut, Anggota

Fraksi PKS ini menyinggung peran FKPT dalam hal penangkapan 15 orang terduga teroris yang ditangkap di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Nasir menegaskan jika peran FKPT diberdayakan dengan maksimal maka ruang-ruang pergerakan terorisme pasti dapat di cegah sejak dini.

“Peran FKPT yang belum maksimal memang selalu disebabkan oleh alasan klasik, yaitu kekurangan anggaran, namun untuk sebuah forum, anggaran yang tersedia saat ini sebenarnya sudah memadai” tegas Nasir.

Nasir pada kesempatan itu, menghimbau kepada FKPT untuk menajamkan peran dan

kegiatan di daerah dengan sejumlah kegiatan prioritas. Misal di Provinsi Aceh, FKPT hanya berkuat di Ibukota Provinsi saja (Banda Aceh) sehingga tidak terdengar di Kabupaten/ Kota di wilayah tersebut.

Nasir juga berharap FKPT perlu melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi III yang ada di Dapil sehingga bisa dibangun sinergi yang baik.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI



“Jika peran FKPT diberdayakan dengan maksimal maka ruang-ruang pergerakan terorisme pasti dapat di cegah sejak dini. Peran FKPT yang belum maksimal memang selalu disebabkan oleh alasan klasik, yaitu kekurangan anggaran, namun untuk sebuah forum, anggaran yang tersedia saat ini sebenarnya sudah memadai”



Legislator PKS Anggap Program Ketahanan Pangan Pemerintah Hanya 'Tipu-tipu'

KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Kritik pedas datang dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengenai program ketahanan pangan yang digaungkan oleh pemerintah selama ini.

Slamet menganggap pidato presiden soal ketahanan pangan hanya tipu-tipu dan atau sekedar pemanis di tengah permasalahan bangsa yang semakin rumit.

Menurutnya, Presiden Jokowi beserta jajarannya tidak serius dalam visi ketahanan pangan. Buktinya dalam nota keuangan tahun 2023 masih memasukkan food estate sebagai salah satu pilar ketahanan pangan padahal fakta di lapangan kegiatan tersebut hanya menghamburkan uang negara tanpa hasil yang bisa diukur.

Baru-baru ini viral sebuah video dokumenter yang menunjukkan lokasi food estate untuk menanam singkong justru tidak terurus dan hanya menyiksa tanaman yang kerdil dan hutan yang sudah gundul.

Disisi yang lain, Slamet juga mengkritisi anggaran ketahanan pangan yang jumlahnya 95 triliun, namun setelah dihitung yang terkait dengan kementerian kelautan dan kementerian pertanian sebagai kementerian dan lembaga yang diamanahi untuk mengurus ketahanan pangan hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran ketahanan pangan tersebut.

"Pertanyaannya kemana sisa anggaran yang lainnya? Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya apalagi dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Anggaran yang besar tersebut harus betul-betul digunakan tepat sasaran serta harus dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani

dan nelayan," kata Slamet, Rabu (31/08) di Jakarta.

Politisi senior PKS ini juga mencatat sejumlah permasalahan pangan di Indonesia. Ia menunjukkan data tahun 2020-2021 peringkat keamanan pangan Indonesia merosot 12 peringkat begitu juga dengan skor indeks kelaparan global Indonesia yang mendekati kondisi kelaparan kronis.

"Tentu saja ini menjadi perhatian serius pemerintah apalagi saat ini rencana pencabutan subsidi BBM akan terus menekan kemampuan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional."

Rencana kenaikan BBM juga mencederai nilai kemandirian yang pemerintah desain sendiri yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat karena akan menyebabkan jutaan petani dan nelayan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya akibat biaya operasionalnya membengkak.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan BBM bersubsidi dan terus menjaga ketersediaan pasokannya khususnya bagi entitas kecil seperti petani dan nelayan.



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

"Anggaran ketahanan pangan yang jumlahnya 95 triliun, namun setelah dihitung yang terkait dengan kementerian kelautan dan kementerian pertanian sebagai kementerian dan lembaga yang diamanahi untuk mengurus ketahanan pangan hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran ketahanan pangan tersebut. Pertanyaannya kemana sisa anggaran yang lainnya?"

Anggota FPKS: Kenaikan Harga BBM akan **Menambah** Jumlah Orang Miskin

KUTIPAN

Padang (27/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengingatkan Pemerintah bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada petani dan masyarakat berpenghasilan tetap.

Kenaikan BBM, tegas Hermanto, akan berdampak pada semakin bertambahnya jumlah orang miskin.

"Kenaikan harga BBM semakin dirasakan oleh petani dan warga yang berpenghasilan tetap karena menurunnya daya beli," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengungkapkan, pemerintah memiliki tiga pertimbangan terkait menghadapi gejolak harga minyak dunia dan tingginya beban subsidi BBM.

"Tiga pertimbangan tersebut adalah menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN;

mengendalikan volume pertalite dan solar; menaikkan harga pertalite dan solar," sebut Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I ini.

Hermanto menyatakan dengan tegas menolak opsi kenaikan harga BBM.

"Saya menolak kenaikan harga BBM untuk saat ini. Kenaikan harga BBM saat ini akan berdampak pada bertambahnya orang miskin dan memburuknya situasi ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali," papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Menurutnya, Pemerintah harus memperhitungkan dampak transmisi kenaikan harga BBM yang semakin meluas terhadap harga sejumlah barang kebutuhan

pokok dan kebutuhan sekunder.

"Dampak langsung kenaikan BBM adalah kenaikan biaya transportasi, biaya angkut, biaya proses produksi, biaya komponen bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya lain-lain. Semua kenaikan itu berimplikasi pada kenaikan harga umum atau inflasi," tutur Hermanto.

Lebih jauh Hermanto menegaskan, momentum kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat karena sejumlah barang kebutuhan pokok, pajak dan bunga pinjaman belakangan ini sudah mengalami kenaikan lebih awal.

"Bertemunya dua keadaan ekonomi yang tidak saling menguntungkan yaitu kenaikan harga umum dan melemahnya daya beli masyarakat, bisa memicu krisis multidimensi yang tak terkendali," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya menolak kenaikan harga BBM untuk saat ini. Kenaikan harga BBM saat ini akan berdampak pada bertambahnya orang miskin dan memburuknya situasi ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali,"



Soal Harga Beras, Aleg PKS: Harga di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain akibat Produksi Tinggi

KUTIPAN

Jakarta (21/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim harga beras di Indonesia yang paling murah dibandingkan negara lain.

Menurut Johan, sebagai kepala pemerintahan mesti memahami bahwa ada persoalan serius yang menyebabkan mengapa harga beras Indonesia justru lebih mahal dibandingkan negara lain terutama negara-negara di ASEAN.

"Jika presiden membandingkan harga beras kita dengan Jepang, Korea dan Amerika tentu tidak sepadan karena negara tersebut memang sangat tinggi harga beras namun akan lebih bijak membandingkan harga beras kita dengan negara Asia lainnya terutama negara di ASEAN dimana ternyata harga beras kita jauh lebih mahal walaupun produksi kita tinggi dari negara produsen beras lain," ujar Johan.

Selanjutnya Johan menjen-

laskan bahwa produktivitas beras di Indonesia lebih rendah dibanding negara Vietnam dan dari sisi harga, negara kita lebih tinggi dari negara lain.

"Menurut saya persoalan utama perberasan di negara kita adalah tingginya biaya produksi beras, terutama komponen biaya sewa lahan dan biaya tenaga kerja sehingga struktur biaya produksi beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia," ucap Johan.

Politisi PKS ini berharap Presiden Jokowi bisa membandingkan harga beras kita dengan Thailand atau Vietnam dimana harga beras di negara tersebut masih rata-rata Rp 5.000 an (per kilogram).

"Walaupun kita surplus beras namun harga beras

masih mahal, sebagai contoh kita ambil data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang mencatat rata-rata harga beras per kilogram telah menyentuh angka Rp 13,77 ribu per kilogram pada Bulan Juli 2022 lalu, bahkan harga jual di pasar modern Lampung menjadi yang termahal mencapai Rp 25.000 per kilogram," papar Johan.

Lebih lanjut Johan merinci bahwa harga beras di Indonesia lebih mahal dari negara-negara seperti Singapura, Brasil, Ukraina, Thailand, Paraguay, India, Iran, Bangladesh dan lain-lain.

"Sejak awal kita selalu mengingatkan pemerintah agar selalu mewaspadai inflasi pangan terutama harga beras sebagai makanan pokok rakyat terutama negara-negara di ASEAN," urai Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong agar pemerintah membuat kebijakan yang menekan biaya produksi beras dengan cara memperbaiki mekanisme produksi dan sistem distribusi yang lebih efisien.

"Saat ini sebaiknya



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saat ini sebaiknya pemerintah menggerakkan beras sebagai penggerak ekonomi di pedesaan dengan cara memberikan lahan gratis kepada petani gurem dan meningkatkan investasi Pertanian yang berkelanjutan agar petani lebih sejahtera"

pemerintah menggerakkan beras sebagai penggerak ekonomi di pedesaan dengan cara memberikan lahan gratis kepada petani gurem dan

meningkatkan investasi Pertanian yang berkelanjutan agar petani lebih sejahtera" demikian tutup Johan Rosihan.

Andi Akmal Pasluddin Tak Sepakat Pernyataan Menko Perekonomian, Pangan Stabil

KUTIPAN

Jakarta (21/08) --- Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan bahwa harga komoditas pangan di pasar saat ini sudah relatif stabil mendapat tanggapan keras dari anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin.

Akmal mengatakan, ada yang tidak pas pernyataan ini yang membuat ia khawatir, bahwa negara baik-baik saja padahal masih sangat mengkhawatirkan pada persoalan pangan dan energi.

"Bagaimana stabil pangan kita ini. Saya khawatir pemerintah terlena dengan kondisi yang dikatakan stabil padahal masih carut marut. Kondisi Harga-harga baik pangan maupun energi termasuk BBM dan gas, sudah melampaui batas nalar. Memang kondisi krisis global menghantui di berbagai bidang: politik, ekonomi, energi hingga lingkungan. Tapi saya melihat Pemerintah tidak siap

menghadapi ini semua", ujar Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjabarkan, bahwa apa yang dikatakan Menko Perekonomian ini salah besar kalau pangan sudah stabil.

"Per hari ini saja, berdasarkan keterangan yang ia dapatkan, Harga telur dan daging ayam ras masih terus mengalami reli kenaikan di rata-rata seluruh pasar tradisional Indonesia," ungkapnya.

Akmal menerangkan kembali info yang didapatkan, bahwa Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Jumat

(19/8/2022) menunjukkan kenaikan harga telur naik 0,83 persen dibanding hari sebelumnya.

Daging ayam naik 0,58 persen jadi Rp34.650 per kg. Harga cabai pun kembali naik tipis seperti cabai merah besar naik 0,47 persen dibanding kemarin jadi Rp63.750 per kg, cabai rawit merah naik 0,15 persen jadi Rp66.350 per kg, cabai merah keriting harganya tetap di Rp63.200 per kg, dan cabai rawit hijau turun 0,47 persen jadi Rp52.750 per kg.

"Jangan sampai pemerintah terlena dengan pernyataan-pernyataannya. Kondisi pangan kita masih tidak stabil. Biaya logistik akibat kenaikan BBM menjadi unsur besar naiknya harga pangan yang jauh dari lokasi produksi pertanian pangan, termasuk perikanan. Sudah dapat terlihat jelas di lapangan, jika pemerintah bekerja optimal memperbaiki kondisi tataniaga pangan, tanpa mesti di ekspose, masyarakat sendiri dapat menilai baik buruknya kinerja pemerintah", tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Jangan sampai pemerintah terlena dengan pernyataan-pernyataannya. Kondisi pangan kita masih tidak stabil. Biaya logistik akibat kenaikan BBM menjadi unsur besar naiknya harga pangan yang jauh dari lokasi produksi pertanian pangan, termasuk perikanan. Sudah dapat terlihat jelas di lapangan, jika pemerintah bekerja optimal memperbaiki kondisi tataniaga pangan, tanpa mesti di ekspose, masyarakat sendiri dapat menilai baik buruknya kinerja pemerintah”



Mari Tetap Kenakan Masker

Aleg PKS: Roadmap Rumah Subsidi Pemerintah **Belum Optimal** Dikeluhkan Pengembang

KUTIPAN

Tasikmalaya (24/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan bahwa pertumbuhan sektor properti yang merata ke semua kelompok masyarakat, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah membutuhkan dukungan dari semua stakeholder perumahan.

"Kalau mau mengurangi backlog kebutuhan rumah di Indonesia maka perlu upaya kuat dari seluruh komponen yang ada di sektor properti. Oleh karenanya Komisi V DPR RI mengundang salah satu stakeholder yakni Asoisasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) hari ini (22/08/2022). Untuk memperbaiki kesenjangan ini," kata Politisi asal Fraksi PKS.

Menurut Dia, masukan-masukan yang diberikan oleh APERSI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tersebut dapat disimpulkan bahwa Roadmap Program Rumah Sub-

sidi Pemerintah belum optimal. Sehingga banyak terjadi kendala dari sisi pengembang.

"Permasalahan klasik yang sering menjadi momok bagi pengembang adalah kuota program rumah subsidi yang tidak konsisten di setiap tahunnya sehingga pasokan tidak optimal. Selain itu lahan yang semakin terbatas sekaligus kenaikan harga membuat pengembang mulai kesulitan dalam melakukan operasional bisnisnya," tuturnya

Terkait dengan lahan, senada dengan masukan Apersi dan para pemerhati properti, di sisi pasokan maka pemerintah

harus bisa mengendalikan harga. Sebagaimana yang dilakukan Singapura, pemerintahnya telah menandai lahan untuk rumah sederhana. Dengan demikian lahan tersebut tidak akan dipakai untuk pembangunan lainnya.

"Di Indonesia, Pemerintah melalui mengikuti mekanisme arus pasar. Tidak heran harga lahan terus naik. Padahal jika Pemerintah memiliki political will yang kuat dengan tujuan kemaslahatan yang lebih besar terkait lahan, ada kemungkinan membekukan harga lahan demi program rumah bersubsidi.

Maka Pengembang tidak akan menjerit seperti ini," jelas Toriq.

Dia berharap, masukan dari Apersi ini dapat segera dirapatkan antara legislatif dan eksekutif. Muaranya supaya pemerintah dapat memperbaiki roadmap program perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sehingga peningkatan secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dapat tercapai pada 2024," ungkapnya



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Di Indonesia, Pemerintah melalui mengikuti mekanisme arus pasar. Tidak heran harga lahan terus naik. Padahal jika Pemerintah memiliki political will yang kuat dengan tujuan kemaslahatan yang lebih besar terkait lahan, ada kemungkinan membekukan harga lahan demi program rumah bersubsidi. Maka Pengembang tidak akan menjerit seperti ini,"

Aleg PKS: BBM Naik, Biaya Transportasi dan Logistik **Semakin Meroket**

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi Pemerintah yang telah memberikan tanda akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menyiapkan beberapa skemanya karena dianggap membebani APBN.

Presiden Joko Widodo sendiri, kata Suryadi, menjelaskan bahwa Pemerintah harus memutuskan kenaikan harga BBM secara hati-hati, termasuk menghitung dampak dari kebijakan tersebut.

"Saat ini Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun dan butuh tambahan sekitar Rp 198 triliun untuk mencapai Rp 700 triliun bila akan menahan harga BBM subsidi, meskipun Pemerintah menyebutkan belum jelas sumber anggarannya dari mana," ujarnya.

Apabila beban APBN menjadi alasan kenaikan harga BBM tersebut, tegas Suryadi, maka FPKS meminta agar

Pemerintah menghemat terlebih dahulu pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

"Misalkan pagu pembangunan infrastruktur IKN dari APBN yang akan menghabiskan Rp 5,10 triliun pada T.A.2022 dan Rp 20,76 triliun pada T.A. 2023," ungkap pria yang akrab disapa SJP ini.

Padahal, tambah SJP, jika Pemerintah dapat menggandeng swasta sesuai janjinya, maka pagu IKN dari APBN tidak perlu sebesar itu sehingga tidak menambah lagi beban APBN.

"Yang jelas, kenaikan harga BBM akan sangat berdampak pada sektor transportasi. Sebagai contoh transportasi udara yang sudah

kena dampak terlebih dahulu dari kenaikan harga avtur sehingga mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat," tegas SJP.

Pada transportasi darat, imbuh SJP, naiknya harga BBM akan berimbas pada meroketnya tarif angkutan umum sehingga memukul mundur pemulihannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21,27 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yooy).

"Pada sektor logistik, komponen harga BBM mencakup 29%-32% dari total biaya operasional truk, sehingga setiap kenaikan harga bahan bakar sebesar Rp1.000 akan menaikkan biaya operasional 4%. Artinya, ongkos kirim juga bakal meroket," ungkapnya

"FPKS menyatakan menolak wacana kenaikan harga BBM tersebut karena berdampak sangat berat pada perekonomian masyarakat. Diperkirakan sumbangan inflasi kenaikan BBM subsidi dapat mencapai 1,97 persen.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Kemungkinan inflasi akan bertambah lagi juga karena adanya rencana pemerintah menaikkan tarif ojek daring atau ojol hingga 30% pada akhir bulan Agustus ini. Padahal Pemerintah selama 3 tahun ini telah menerapkan kebijakan pelepasan defisit demi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19,"

Padahal, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen," jelas

Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tolak Kenaikan BBM Subsidi, Nevi Zuairina Minta Penggunaan Pertalite dan Solar **Tepat Sasaran**

KUTIPAN

Jakarta (26/08) --- Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dengan solusi lebih memperketat pengguna pertalite dan solar.

Menurutnya, saat ini masih tidak sesuai peruntukan BBM bersubsidi yang di tunjukkan dengan data 80 persen pengguna BBM bersubsidi adalah golongan mampu.

“Saya melihat pengguna motor ini menyerap konsumsi BBM tidak terlalu signifikan. Pengguna motor inilah yang mestinya mendapat kesempatan seluasnya untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi baik dari jenis pertalite maupun solar. Selain itu, mobil di bawah 1500 cc juga masih dapat ditoleransi untuk menikmati subsidi BBM. Dan yang perlu mendapat prioritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana kendaraan logistiknya perlu dapat sokongan untuk mengembangkan

bisnis mereka”, urai Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pemerintah, bahwa ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak.

Nevi menyebut, dari informasi yang ia dapatkan, bahwa dampak dari kenaikan harga Pertalite diprediksi akan mendorong tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year. Ini akan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015.

Nevi menambahkan, konsumsi BBM bersubsidi jenis

Pertalite tahun ini diprediksi akan habis pada September 2022 dengan habisnya kuota sebesar 23,05 juta kiloliter. Menurutnya, seharusnya kuota ini cukup bila peruntukan BBM subsidi hanya untuk masyarakat bawah yang selama ini hanya mengkonsumsi sebanyak 20% saja.

“Kami sudah bersepakan di Fraksi PKS, bahwa i rencana pemerintah untuk menaikkan BBM harus di tunda sampai kondisi kondusif. Karena dengan menaikkan BBM, akan menyakiti hati rakyat. Pemerintah harus sensitif terhadap penderitaan rakyat yang baru saja terdampak pandemi, banyak yang di PHK dan usahanya bangkrut”, tutur Nevi.

Anggota DPR juga anggota Badan Anggaran ini menegaskan, bila harga pertalite dan solar naik, sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat, dan memberberat beban rakyat.

“Kita memahami bahwa Beban APBN sudah sangat



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

“Sudah banyak dampak tingginya BBM ini yang mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijak untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi”,

berat. Namun Subsidi BBM ini ada solusi dengan mendisiplinkan penggunaannya. Tidak perlu lagi kendaraan mahal mengkonsumsi BBM subsidi. Sudah banyak dampak tingginya BBM ini yang

mengakibatkan usaha kerakyatan gulung tikar termasuk pada segmen petani dan nelayan. Untuk itu, kami meminta pemerintah bijak untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi”, tutup Nevi Zuairina.

Aleg PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Telur

KUTIPAN

Jakarta (26/08) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah mengendalikan harga telur yang terus melambung.

Telur bukan hanya menjadi kebutuhan pokok, kata Amin, namun juga bahan baku penting dalam usaha aneka produk makanan yang pelakunya sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional (IPHPS), harga telur mencapai Rp 31.500 per kg. Sedangkan di sejumlah pasar tradisional di Jabodetabek berkisar antara Rp 32.000 – Rp 33.000 per kg. Ini merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

"Telur bukan hanya penting bagi perbaikan gizi masyarakat, namun juga bagi kelangsungan usaha sejumlah pelaku UMKM. Jika terlambat dikendalikan, dikhawatirkan banyak UMKM yang berhenti beroperasi," kata Amin.

Sejumlah penyebab kenaikan harga telur diantaranya, adalah meningkatnya permintaan (demand) atau konsumsi telur di masyarakat. Konsumsi

telur sudah meningkat ke level permintaan seperti sebelum pandemi Covid-19.

Persoalannya, di sisi lain, pasokan atau produksi telur, terutama di sentra-sentra produksi belum pulih setelah dihantam pandemi. Pada September 2021 lalu, harga telur ayam sempat anjlok hingga menyentuh Rp 14.000 per kg, bahkan di Blitar yang merupakan sentra produsen telur mencapai Rp 13.000 per kg.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak peternak mandiri yang menutup usahanya karena mengalami kerugian besar. Saat ini belum semua peternak mandiri bangkit dan kembali memproduksi telur ayam. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan saat ini.

Penyebab lain kenaikan harga telur, menurut Amin disebabkan naiknya harga pakan dengan kenaikan hingga 30% dari sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh kenaikan

harga jagung di mana impor jagung RI masih cukup besar dan juga harga gandum akibat konflik Rusia vs Ukraina. Gandum merupakan campuran pakan ayam

Dampak kenaikan harga telur, akan meningkatkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat akibat nilai uang yang tergerus.

Benahi Tata Niaga

Menurut Amin, solusinya harus ada perbaikan tata niaga, misalnya dengan memperpendek rantai pemasaran telur. Tata Niaga pakan seperti jagung juga harus dibenahi agar rantai pemasaran lebih pendek sehingga harga lebih murah.

"Ini momentum membentahi tata niaga pakan dan telur," kata Amin.

Pemerintah harus memberikan insentif bagi pelaku usaha peternakan kecil dan menengah yang tahun lalu sempat dihantam pandemi sehingga bisa bangkit dan kembali memulai usahanya, misalnya dengan menggenjot kredit usaha rakyat (KUR) untuk peternakan.

Amin juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM di saat seperti ini karena itu bisa memicu inflasi naik lebih tinggi. Kenaikan BBM akan menaikkan



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

Pemerintah juga harus lebih serius membangun kemandirian industri pakan dengan memperkuat produksi bahan baku pakan seperti jagung, kedelai (bungkil kedelai), menggantikan gandum dengan sorgum, dan mendorong peningkatan produksi tepung ikan dan tepung tulang.

biaya transportasi baik pada rantai pemasaran telur maupun pakan ayam.

Pemerintah juga harus lebih serius membangun kemandirian industri pakan dengan memperkuat produksi bahan baku pakan seperti jagung, kedelai (bungkil

kedelai), menggantikan gandum dengan sorgum, dan mendorong peningkatan produksi tepung ikan dan tepung tulang.

"Sebagai negeri maritim, masak iya kita tidak sanggup mandiri untuk produksi tepung ikan," pungkasnya.



Hal Yang Tidak Boleh Sembarang
Disebar Di Media Sosial

PKS Ajak Masyarakat Lindungi Data Pribadi

Desain : Aditya Angga



Tiket Perjalanan/
Boarding Pass



Dokumen Rahasia
Perusahaan



KTP & SIM
yang berisi
identitas diri



Dokumen Penting
Ijazah, Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran, dll



Selfie dengan KTP



Foto Tanda Tangan



Dokumen Keuangan
Slip Gaji, No Rekening,
Nomor Kartu Kredit,
Nomor Kartu ATM



Nama Ibu Kandung
yang biasanya dipakai
untuk membuat nomor
rekening dan ponsel

Pemerintah Berencana Naikan Harga BBM

Anggota FPKS: Musibah Baru Buat Rakyat!

KUTIPAN

Jakarta (23/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto dengan tegas menilai tidak ada alasan Pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM ini akan menjadi musibah baru buat rakyat.

"Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan BBM. Hal ini karena dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD 100 per barel," kata Rofik Hananto Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Sekarang ini, menurut Rofik, harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah menurun dan berada di kisaran USD 90 per barel, dengan rincian WTI Crude sebesar USD 89,63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel. Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.

"Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti

ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," kata legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 itu.

Rofik menilai, Pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya. Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan dan kereta cepat.

Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, karena anggarannya yang membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN. Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar US\$1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun atau

setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.

"Ini berbeda dengan janji Presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp 400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," tuturnya.

Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progress per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 %. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depannya, tanpa adanya bantuan anggaran dari APBN.

Jelas sekali, ujar Rofik, Pemerintah gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk secara maksimal mensejahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan Pemerintah sebagai beban. Padahal subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Heran aja, kok ada Pemerintah yang tidak suka rakyatnya senang. Lupa mungkin ya kalau mandat memerintah itu bersumber dari rakyat," kata Rofik.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk secara maksimal mensejahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan Pemerintah sebagai beban. Padahal subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat"

Dia menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional. "Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah

Air akan melonjak tinggi. Kenai-kan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Ini pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional," ujar Rofik mengakhiri.

Komisi VII DPR RI: Pemerintah **Harus Hitung** **Dampak Lebih Jauh** Jika Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

KUTIPAN

Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Diah mengatakan, jika mendengarkan pidato Presiden saat mengantarkan nota keuangan APBN 2023, tidak disinggung masalah rencana kenaikan BBM bersubsidi.

"Presiden hanya menyebutkan subsidi BBM sudah mencapai Rp502 triliun. Tapi tidak menyinggung rencana kenaikan harga," ujar Diah, Jumat, 19 Agustus 2022.

Kalaupun isu kenaikan tersebut muncul karena subsidi BBM sudah mencapai Rp502 triliun dan membuat beban APBN tinggi, kata Diah, hal tersebut tidak selainya diikuti dengan kenaikan harga.

"Kalau itu diwujudkan dengan kenaikan harga, akan ada dampak ikutan yang tidak

sederhana," katanya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi menurut Diah, akan berdampak luas, seperti penurunan daya beli, sampai kenaikan harga dan tarif yang lain. Dia menyontohkan dengan harga BBM bersubsidi naik, akan diikuti juga kenaikan tarif angkutan umum juga transportasi lainnya.

Hal ini akan memicu dampak lainnya yakni kenaikan harga. Sehingga inflasi yang ditimbulkan juga akan tinggi.

"Kalau untuk menaikkan BBM harus diperhitungkan cermat. Memang hemat, tapi kalau terjadi inflasi berimbang tidak? Tidak semata mengurangi beban APBN. Tapi harus juga dipikirkan

bagaimana beban masyarakat?," Katanya.

DPR sendiri lanjut Diah, akan melakukan rapat mengenai masalah rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sudah diagendakan pekan depan akan rapat khusus dengan Pertamina juga Kementerian ESDM untuk mencari titik tengah terbaik," ungkapnya.

Menurutnya, banyak hal yang bisa menjadi solusi terus membengkaknya beban APBN untuk subsidi BBM. Salah satunya dengan cara memperkuat pengawasan, mengingat banyak kebocoran di lapangan, seperti industri yang masih menggunakan cara ilegal dalam memperoleh BBM bersubsidi.



Dipl.Ing. Hj. **DAIH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

"Kalau untuk menaikkan BBM harus diperhitungkan cermat. Memang hemat, tapi kalau terjadi inflasi berimbang tidak? Tidak semata mengurangi beban APBN. Tapi harus juga dipikirkan bagaimana beban masyarakat?,"



Legislator PKS: Pemerintah Aneh! Katanya APBN Surplus Tapi BBM Mau Dinaikkan

KUTIPAN

Jakarta (19/08) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai Pemerintah tidak konsisten dalam penyampaian nota APBN tahun 2022.

Hal tersebut setidaknya tercermin dari pernyataan Pemerintah yang mengaku APBN 2022 mengalami surplus tapi pada saat yang sama malah mau menaikkan harga BBM.

Menurut Mulyanto, pernyataan tersebut sangat janggal. Karena lazimnya bila APBN benar-benar surplus harusnya Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM. Apalagi di saat kondisi ekonomi masyarakat belum stabil karena pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaiknya wacana seperti itu dihentikan. Jangan bikin malu Presiden," ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto dalam Pidato Kenegaraan di Gedung

MPR/DPR/DPD, Selasa 16/8, Presiden Jokowi justru menyapaikan prestasi kabinetnya, dimana ekonomi tumbuh positif sebesar 5.44 persen. Pada Semester Satu tahun 2022, APBN surplus sebesar Rp 106 triliun.

Sementara itu neraca perdagangan surplus selama 27 bulan berturut-turut tanpa jeda. Pada Semester satu tahun 2022 saja surplusnya mencapai angka sebesar Rp 364 triliun.

"Ini tentu pengaruh windfall profit (durian runtuh) dari naiknya harga-harga komoditas seperti batubara, tembaga, emas, CPO, dll. termasuk juga migas. Pertamina sendiri, yang menjadi operator migas dominan di Indonesia pasca akuisisi Chevron di Blok Rokan, mengalami keuntungan besar di sisi hulu migas," seru Mulyanto. Karenanya, menurut

Mulyanto, berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dengan memanfaatkan booming harga-harga komoditas energi dan pangan tersebut menjadi sangat strategis.

Di sisi lain penghematan APBN pada proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perlu segera dilakukan.

"Kalau inisiatif ini yang dikembangkan, tentunya surplus keuangan negara tersebut dapat dioptimalkan untuk mengokohkan subsidi BBM, agar kejutan ekonomi dari luar dapat diredam melalui bantalan APBN tersebut," katanya lagi.

Mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah tingginya tingkat inflasi hari ini, kata Mulyanto, sama saja ingin mendorong masyarakat menjadi semakin susah dan menderita. "Pilihan yang tidak tepat di tahun politik dan di akhir masa kabinet Presiden Jokowi," tutup Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah jangan plin-plan. Sementara Presiden bilang ekonomi kita bagus dan APBN surplus, para menteri justru berwacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaiknya wacana seperti itu dihentikan. Jangan bikin malu Presiden,"

Politisi PKS Dorong Rasionalisasi Biaya Haji demi Jaga Kesinambungan Pembiayaan Haji

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan secara efisien.

Dengan demikian, apabila demi menutupi penyelenggaraan haji untuk sekali musim membutuhkan Rp16 triliun, lanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana memperoleh tambahan Rp8 triliun lainnya mengingat perolehan nilai manfaat yang sekitar Rp8 triliun selama ini didapat dengan cara investasi, yang kami nilai lebih banyak dilakukan secara konvensional?

Anggota Badan Legislasi ini menambahkan, apabila strategi investasi yang dilakukan BPKH hanya melalui penempatan, pihaknya khawatir cara tersebut tidak akan mampu menjaga sustainabilitas keuangan haji.

Dia mengatakan, undang-undang pengelolaan keuangan haji mendorong BPKH untuk melakukan investasi langsung,

akan tetapi dalam praktiknya BPKH belum mampu untuk memperbanyak investasi langsung.

"Mungkin karena risiko, atau karena BPKH masih tergolong lembaga baru yang lahir pada tahun 2017, jadi belum terlalu lama. Karena itu, investasinya kebanyakan hanya di penempatan. Sedangkan, jika hanya di penempatan, keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari 6 atau 7 persen per tahun. Ini tidak akan bisa menutupi kekurangan setoran jamaah terhadap biaya riilnya," terangnya.

Selain itu, politisi PKS ini menyarankan supaya ke depan, pembagian dana nilai manfaat kepada jemaah yang melalui Virtual Account (VA) dapat mencerminkan pembagian yang lebih riil.

"Contohnya, sepanjang tahun 2020 dana VA dialokasikan sebanyak Rp2 triliun, selanjutnya pada tahun 2021 senilai Rp2,5 triliun. Walaupun masing-masing jemaah haji sama-sama menyimpan uang Rp35 juta, semestinya kebijakannya adalah jemaah haji yang dananya paling lama terendap, nilai manfaat yang diperolehnya semakin besar. Tidak hanya itu, supaya jemaah haji merasakan dampak riil keuntungan dari investasi, maka nilai manfaat yang tersimpan di VA sudah semestinya diberikan dalam bentuk riilnya," katanya.

Tidak cukup sampai di situ, Bukhori juga menyinggung soal koreksi yang juga diperlukan terhadap penggunaan istilah subsidi dalam konteks penyelenggaraan haji.

"Penggunaan istilah subsidi juga perlu dikaji ulang. Pasalnya, sumber dana yang disebut subsidi selama ini sesungguhnya berasal dari dana milik jemaah haji yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola sehingga menghasilkan

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Penggunaan istilah subsidi juga perlu dikaji ulang. Pasalnya, sumber dana yang disebut subsidi selama ini sesungguhnya berasal dari dana milik jemaah haji yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola sehingga menghasilkan nilai manfaat. Sebab itu, istilah yang sebenarnya lebih memadai adalah distribusi nilai manfaat, bukan subsidi,"

nilai manfaat. Sebab itu, istilah yang sebenarnya lebih memadai adalah distribusi nilai manfaat, bukan subsidi,"

pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id



Kebijakan Zakat Indonesia, Aleg PKS: **Harus Kedepankan** Program Penurunan Angka Kemiskinan

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan arahan terkait Kebijakan Zakat di Indonesia.

"Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara," ungkap Iskan.

Iskan menambahkan, terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin.

"Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan dipergunakan untuk

menentukan target masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Zakat merupakan instrumen dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi", ujar Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga mengingatkan penting nya pengelolaan kebijakan zakat untuk lebih mengedepankan penurunan angka kemiskinan.

"Zakat itu difokuskan untuk menangani 8 masalah sosial. Apabila zakat dikelola secara efektif dan efisien maka dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan primer," ujar Iskan.

Maka hal ini, imbuh Iskan, zakat telah berhasil menjadi instrumen yang dapat mengurangi masyarakat dari kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan ekonomi masyarakat miskin serta mendorong pembangunan ekonomi bangsa.

"Oleh karenanya saya meminta kepada Baznas khusus nya Kebijakan Zakat ini harus bisa mengoptimalkan penurunan tingkat angka kemiskinan bagi masyarakat kita di Indonesia", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan point penting dari Kebijakan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini kita juga perlu cermati yakni agar cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai strategi," urainya.

Hal yang harus dilakukan sejak awal, imbuhnya, ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Salah satu bentuk kepedulian orang yang mampu adalah kesediaan untuk membayar zakat dan shadaqah. Strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengurangi kemiskinan yang ada,"

sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mampu terhadap kaum fakir, miskin,

dhuafa. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HNW Kritik Rancangan Perubahan UU Sisdiknas yang Cederai Pesantren

KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik Rancangan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

yang mencederai Pesantren karena tidak mentaati UU Pesantren dengan hanya menyebutkan satu jenis pesantren di dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Padahal, kata Hidayat, UU Pesantren yang bersifat *lex specialis* telah mengukui dan memperlus jenis-jenis Pesantren.

HNW sapaan akrabnya merujuk kepada sejumlah ketentuan di dalam Rancangan Perubahan UU Sisdiknas, seperti Pasal 47, Pasal 74 dan Pasal 120, yang menyebutkan hanya pesantren yang berbentuk pengajaran Kitab Kuning.

"Padahal, apabila merujuk kepada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, jelas disebutkan bukan hanya satu saja tapi ada tiga jenis pesantren," ungkapnya.

Selain pesantren tradisi-

onal yang mengajarkan kitab kuning sebagaimana sudah disebut dalam RUU, imbuhnya, tapi ada juga pesantren berbentuk pengajaran Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin dan juga Pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

"Laku penyusun Rancangan Perubahan UU Sisdiknas ini tidak menjadi contoh yang baik dalam menaati aturan yang ada, dan kalau tidak dikoreksi dapat meredusir pengakuan negara terhadap jenis-jenis pesantren yang disebutkan di dalam UU Pesantren. Juga dikhawatirkan terjadi pembonsaian dan adu domba yang menciptakan kegaduhan di kalangan Pesantren yang sudah sama-sama menerima UU Pesantren. Karenanya sudah sangat

seharusnya RUU ini dikembalikan kepada ketentuan yang benar dalam UU Pesantren," tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu(31/08).

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan ini mengutip Pasal 5 ayat (1) UU Pesantren. Ketentuan itu berbunyi, "Pesantren terdiri atas: a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning; b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum."

"Memang, di dalam RUU Sisdiknas itu merujuk kepada UU Pesantren di berbagai penjelasannya. Namun, ironisnya malah hanya ada penyebutan secara spesifik terhadap salah satu jenis pesantren saja, dan itu dapat mengabaikan keberadaan dua jenis pesantren lainnya yang sama-sama diakui oleh UU Pesantren. Jadi, tidak sinkron dengan UU Pesantren, sehingga harus diperbaiki," ujarnya.



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Memang, di dalam RUU Sisdiknas itu merujuk kepada UU Pesantren di berbagai penjelasannya. Namun, ironisnya malah hanya ada penyebutan secara spesifik terhadap salah satu jenis pesantren saja, dan itu dapat mengabaikan keberadaan dua jenis pesantren lainnya yang sama-sama diakui oleh UU Pesantren. Jadi, tidak sinkron dengan UU Pesantren, sehingga harus diperbaiki

HNW berharap agar Kemendikbudristek dapat segera mengkoreksi dan mengakomodasi masukan ini, seperti yang terjadi sebelumnya saat publik mengkoreksi draft RUU Sisdik-

nas yang menghilangkan penyebutan Madrasah dalam batang tubuhnya dan hanya menyebutkannya dalam penjelasan. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggaran Kesehatan Dipangkas, Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah **Kaji Ulang**

KUTIPAN

Jakarta (19/08) — Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX dari Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani menilai kurang tepat langkah pemerintah yang memangkas anggaran kesehatan pada RAPBN 2023.

Menurut Netty, meskipun angka Covid-19 sudah melandai, namun hal itu bukan alasan yang tepat untuk memangkas anggaran.

"Masalah kesehatan Indonesia bukan hanya soal Covid-19, tapi juga ada stunting, angka kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan, kebiasaan hidup sehat dan sebagainya. Oleh karena itu menurunkan anggaran kesehatan di tengah banyaknya prioritas kesehatan yang tertunda akibat penanganan pandemi bukan langkah yang tepat dan dapat berakibat buruk pada sistem kesehatan," kata Netty, Jumat (19/08).

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dialokasikan sebesar Rp169,8 triliun, turun 20,2 persen

dibanding tahun 2022 yakni Rp212,8 triliun.

"Kita juga tidak dapat menjamin bahwa Covid-19 sudah berakhir dan tidak lagi menjadi ancaman di masa yang akan datang. Justru kita perlu memastikan tersedianya anggaran kesehatan yang prima sebagai bentuk kewaspadaan," katanya.

Menurut Netty, pasca Pandemi Covid-19 yang belum bisa dibilang berakhir ini, pemerintah justru perlu memperbaiki dan membangun sistem kesehatan yang terbuka ke walahuan menghadang pandemi.

"Sistem kesehatan kita harus diperkuat. Enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah akan sulit terealisasi jika kurang didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi dengan

adanya ketentuan tidak bolehnya tenaga honorer di instansi pemerintah, maka pelayanan kesehatan pun terancam kolaps," ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah meninjau dan mengkaji kembali alokasi anggaran kesehatan agar apa yang menjadi target pemerintah terkait transformasi kesehatan bisa tercapai.

Netty juga menginggung terkait rencana naiknya anggaran perlindungan sosial tahun 2023 menjadi Rp479,1 triliun.

"Perlu di-breakdown, untuk apa saja anggaran sebesar itu? Apakah akan dibagikan dalam bentuk tunai atau program instan lainnya? Masyarakat saat ini lebih membutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dari pada bantuan tunai. Apalagi dari data BPS di Februari 2022, sebanyak 50 persen pengangguran di Indonesia berada di usia produktif," paparnya.

"Seharusnya pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini bisa lebih berkelanjutan dibanding bantuan yang sifatnya sementara" terang Netty.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Sistem kesehatan kita harus diperkuat. Enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah akan sulit terealisasi jika kurang didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi dengan adanya ketentuan tidak bolehnya tenaga honorer di instansi pemerintah, maka pelayanan kesehatan pun terancam kolaps,"

Aleg PKS Usulkan Rekomendasi Masyarakat Soal Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)

KUTIPAN

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menyampaikan aspirasi dan rekomendasi masyarakat tentang Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), pada Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Pasalnya, wilayah Kalimantan khususnya di Balikpapan Kalimantan Barat 1 BLK belum berstatus unit pelaksana teknis pusat (UPTP).

"Terkait dengan BLK UPTP, di pulau Kalimantan yang belum itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, dan termasuk dahil kami, maka dari itu, bagaimana kiranya kiat-kiat untuk bisa cepat terrealisasi, lalu soal rekomendasi dari masyarakat," ucap Alifudin saat Raker dengan Kemenaker RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (22/8/2022).

Alifudin merekomendasikan kepada Kemenaker sejumlah hal antara lain : Agar transformasi BLK, dapat

dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan masyarakat dan Pemda setempat serta kemampuan keuangan.

Kemudian, agar transformasi BLK, menjadi UPTP memperhatikan ketersediaan SDM yang ada.

Selanjutnya, agar transformasi BLK, menjadi UPTP memperhatikan kemampuan anggaran untuk penyediaan peralatan dan perawatannya. Agar transformasi BLK, menjadi UPTP memperhatikan kemandirian dan aspek otonomi Daerah.

Berikutnya, berapa minimal BLK UPTP tersebar di 34 provinsi yang mampu menjadi penggerak BLK binaan di bawahnya (BLK UPTD provinsi/kabupaten/kota) dalam menjalankan pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja secara optimal.

BLK tersebut juga memiliki kios 3in1 yang berfungsi sebagai bursa kerja khusus atau penghubung antara pencari kerja lulusan BLK dengan pasar kerja, BLK harus mampu melahirkan lulusan pelatihan yang memiliki keahlian tidak hanya operator, BLK UPTP harus mampu memberikan pelatihan dengan sertifikat tingkat Internasional (Pekerjanya dapat diterima bekerja di Industri di luar negeri dengan upah standar luar negeri).

BLK tersebut juga mampu memberikan pelatihan blend-ed/hybrid dan pelatihan online, BLK harus siap mengakomodir hubungan pencari kerja lulusan BLK dalam mengakses informasi pasar kerja, menjadi Pusat Informasi Pasar Kerja.

BLK harus mampu memberikan pelatihan dan Skill



H. ALIFUDIN, S.E., M.M.
Anggota Komisi IX DPR RI

“BLK harus mampu memberikan pelatihan dan Skill kepada pekerja/buruh sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. BLK harus mampu memprediksikan Skill Teknologi apa yang dibutuhkan oleh Pekerja/buruh di Era Disruption saat ini.”

kepada pekerja/buruh sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. BLK harus mampu mempredik-

sikan Skill Teknologi apa yang dibutuhkan oleh Pekerja/buruh di Era Disruption saat ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Rektor Universitas Negeri
Terjerat OTT KPK

Aleg PKS: Robohnya Benteng Moral Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (21/08) -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan keprihatinan atas terjadinya kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri

Menurutnya, hal itu amat mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai institusi yang seharusnya memberi nilai teladan bagi bangsa.

"Saya amat prihatin atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) kepada Rektor Universitas Lampung (UNILA) dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru, rasanya hancur pendidikan kita, kemana lagi bangsa ini akan mengambil teladan", ujar Mustafa.

la pun meminta agar kampus tidak justru menjadi sarang mafia dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

"Jangan sampai kampus sebagai lembaga pendidikan justru menjadi sarang mafia,

jikalau itu terjadi maka robohlah benteng pertahanan moralitas bangsa", ujarnya lagi.

Terakhir, anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan ini meminta adanya evaluasi total bagi dunia pendidikan di Indonesia.

"Apa yang terjadi di kampus negeri ini merupakan fenomena gunung es yg ada di dunia pendidikan kita. Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah tak terdengar lagi dan nampaknya telah gagal membentuk karakter anak bangsa yang berintegritas. Pendidikan kita di berbagai bidang maupun jenjang perlu dievaluasi total, karena integritas merupakan karakter yg paling mendasar", pungkasnya.



H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Komisi X DPR RI

"Apa yang terjadi di kampus negeri ini merupakan fenomena gunung es yg ada di dunia pendidikan kita. Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah tak terdengar lagi dan nampaknya telah gagal membentuk karakter anak bangsa yang berintegritas. Pendidikan kita di berbagai bidang maupun jenjang perlu dievaluasi total, karena integritas merupakan karakter yg paling mendasar",

Tanggapi Rencana Revisi UU Sisdiknas, Aleg PKS: Ojo Kesusu!

KUTIPAN

Jakarta (28/08) -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, meminta Pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam membahas revisi UU Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Fahmy, proses perubahan UU Sisdiknas harus dilakukan secara seksama dan bersama melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik, dan tidak dipaksakan harus selesai di periode pemerintahan saat ini.

"Proses perubahan UU Sisdiknas tidak boleh dijadikan 'alat' untuk mengejar target taktis ataupun politis.

Pendidikan Nasional bahkan harus dibangun untuk semaksimal mungkin mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945", ujar Fahmy dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu, (28/08).

Lebih lanjut, Fahmy menyebut, inisiatif Pemerintah untuk melakukan perubahan UU Sisdiknas yang telah berusia 20 tahun dapat dipahami dan

wajar.

"Sepanjang dua dekade itu, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa cepat dan sarat dengan tantangan. Pendidikan Nasional juga harus mampu menanggapi dan menghadapi perubahan tersebut agar tidak tertinggal dalam mempersiapkan putera-puteri dan generasi bangsa menghadapi persaingan regional dan global. Namun, Pendidikan Nasional harus tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945", ucapnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa revisi UU Sisdiknas sangat penting karena akan menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dibahas

secara terburu-buru.

"Ini mengatur pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat, baik formal, nonformal ataupun informal; dari rentangan pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi", ungkapnya.

Dalam kenyataannya, imbuh Fahmy, rancangan UU Sisdiknas ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan pengamat pendidikan, akademisi, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia dan juga ormas-ormas besar penyelenggara pendidikan (NU, Muhammadiyah).

"Pokok masalahnya adalah, bahwa pengajuan revisi UU Sisdiknas belum mendesak (urgensi), proses pengajuannya terkesan kurang transparan, minim pelibatan publik, dan lemah argumentasi akademiknya", sebutnya.

Terakhir, Fahmy meminta agar Pemerintah mendengar masukan dan kritik dari banyak pihak, agar tidak memaksakan diri melakukan perubahan/revisi atas UU Sisdiknas.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

"Sepanjang dua dekade itu, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa cepat dan sarat dengan tantangan. Pendidikan Nasional juga harus mampu menanggapi dan menghadapi perubahan tersebut agar tidak tertinggal dalam mempersiapkan putera-puteri dan generasi bangsa menghadapi persaingan regional dan global. Namun, Pendidikan Nasional harus tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945



Wakil Ketua Komisi X FPKS ingatkan Nadiem soal Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan

KUTIPAN

Fikri menghimbau agar Nadiem dan jajarannya di Kemendikbudristek RI dapat lebih mengayomi para guru tersebut, meski persoalan pengangkatan PPPK ini juga melibatkan Kemenpan RB, BKN, bahkan Kemenkeu juga.

Jakarta (24/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih, mengingatkan Nadiem Makarim, Mendikbudristek RI mengenai nasib PPPK yang terombang-ambing pada Rapat Kerja Kemendikbudristek RI dengan Komisi X DPR RI, Selasa (23/8).

Fikri menyebutkan, sejak pengumuman pertama kelulusan PPPK pada 8 Oktober 2021, Komisi X sangat sering didatangi para guru dan tenaga kependidikan yang mempertanyakan nasib mereka yang belum kunjung mendapatkan SK.

"Kami terus monitor, tujuh bulan pertama mereka melaporkan kalau kesulitan mendapatkan penghasilan

karena yang swasta sudah diberhentikan, sementara yang negeri sudah tidak diberi jam mengajar dan digantikan orang lain. Ini sudah hampir 12 bulan," ujar Fikri.

Ada 293 ribu guru yang sudah mendapat formasi tetapi belum mendapatkan SK. Ia khawatir akan seperti kelulusan pada tahun 2019 yang baru mendapatkan SK pada 2021.

Selain persoalan tersebut, terkait rekrutmen guru PPPK ini Fikri juga menyoroti penempatan mereka.

"Ada yang kemudian diberi opsi di lempar ke luar Jawa seperti ke Kalimantan Utara bahkan Papua, rata-rata tidak bersedia, ada yang bersedia kalau di Jawa saja," imbuh alegg

PKS tersebut.

Fikri menghimbau agar Nadiem dan jajarannya di Kemendikbudristek RI dapat lebih mengayomi para guru tersebut, meski persoalan pengangkatan PPPK ini juga melibatkan Kemenpan RB, BKN, bahkan Kemenkeu juga.

"Mereka ingin ada 'bapaknya', ada yang mengayomi. Meski yang menentukan soal ini tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Kemenpan-RB, Kemenkeu, BKN, dst, Kemendikbudristek dapat mengayomi dan memberi kepastian status, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka," tutup Alegg yang pernah berprofesi sebagai guru ini.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Mereka ingin ada 'bapaknya', ada yang mengayomi. Meski yang menentukan soal ini tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Kemenpan-RB, Kemenkeu, BKN, dst, Kemendikbudristek dapat mengayomi dan memberi kepastian status, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka,"

Wakil Ketua Komisi X FPKS: Konservasi Sifatnya Wajib, Jangan Jadikan Isu untuk Naikkan Tarif

KUTIPAN

Jakarta (22/08) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menegaskan isu konservasi merupakan suatu hal yang wajib dijalankan oleh setiap pengelola di situs cagar budaya, maupun taman nasional yang sekaligus sebagai destinasi wisata prioritas.

"Konservasi sifatnya wajib, jangan hanya dijadikan alasan untuk menaikkan tarif," kata Fikri saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Nusa Tenggara Timur, PT Taman Wisata Candi (PT TWC) Borobudur & Ratu Boko, Badan Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, serta PT. Flobamor di DPR, Senin (22/08).

Fikri mengatakan bahwa dalam konteks konservasi selalu harus memperhatikan carrying capacity atau daya dukung dan daya tampung suatu cagar budaya maupun

taman nasional untuk menjaga keberlangsungan destinasi wisata tersebut.

"Daya dukung dan daya tampung harus tertuang dalam dokumen perda tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)," imbuh politisi PKS ini.

Fikri juga meminta kepada yang hadir dalam RDPU, khususnya Pemerintah Daerah dan para Pengelola Wisata Candi Borobudur serta Taman Nasional Komodo untuk menggunakan perspektif konservasi dengan dasar hukum perundangan yang sesuai.

Misalnya terkait cagar budaya, mesti mengacu pada UU 11 tahun 2010 tentang

cagar budaya.

"Di pasal 97 UU Cagar budaya, badan pengelola terdiri atas unsur pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat," tambah Fikri.

Dia mendukung konsep single authority management, atau satu atap untuk pengelolaan candi Borobudur khususnya, sesuai dengan UU cagar budaya tersebut.

Sedangkan menurut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsep daya dukung dan daya tampung taman nasional khususnya harus tertuang dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

"Bagi pemda yang mengelola kawasan hutan lindung atau konservasi alam, seharusnya KLHS merupakan bagian tak terpisahkan dalam Perda RTRW mereka," imbuh Doktor Ilmu lingkungan ini.

Maka, menurut Fikri pendekatan physical carrying capacity, atau daya dukung fisik tepat diterapkan dalam konservasi khususnya di Candi Borobudur dan Taman Nasional



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Pendekatan physical carrying capacity, atau daya dukung fisik tepat diterapkan dalam konservasi khususnya di Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo.

Daya dukung fisik suatu kawasan berhubungan dengan ukuran dan jumlah area yang dapat diakomodasi dalam suatu ruang fisik yang layak."

Komodo. Daya dukung fisik suatu kawasan berhubungan dengan ukuran dan jumlah area yang dapat diakomodasi dalam suatu ruang fisik yang layak.

Sedangkan terkait isu kenaikan tarif di candi

Borobudur dan Taman Nasional Komodo, Fikri menilai wajar adanya terobosan dari pemda terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Rapat dengan Kemenkeu, Aleg PKS Berikan Sejumlah Catatan pada Laporan Keuangan APBN 2021

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Komisi XI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas laporan keuangan kementerian keuangan dalam APBN tahun 2021.

Pada rapat yang dilaksanakan di kompleks kantor DPR RI Senayan Jakarta ini, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan apresiasi atas capaian kementerian keuangan yang sudah 11 kali mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Bersama dengan itu, ia menyampaikan beberapa masukannya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi kementerian keuangan sangat berat.

“Mengembalikan defisit keuangan negara maksimal 3 persen di tahun 2023 tentu tidak mudah. Tapi dengan kerja

keras dari semua unsur, mudah-mudahan kita mampu mengatasi semua itu,” kata Anis.

Masukan pertama yang disampaikan Anis terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021 yang menyebutkan terdapat 27 temuan pemeriksaan, Anis menegaskan bahwa temuan itu harus tetap ditindaklanjuti.

“Walaupun ditegaskan tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan, tetapi kami ingin hal ini tetap ditindaklanjuti,” ujar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga

menyoroti masalah pengawasan pajak.

“BPK mengingatkan atas pemberian fasilitas pajak penghasilan badan masih belum memadai pengawasannya. Fasilitas yang diberikan itu seperti tax ho-liday, tax allowance, super tax deduction, investment allowan-ce dan super tax deduction riset. Menurut BPK, kegiatan pengawasan pemberian fasilitas PPH Badan ini belum dilaksanakan secara memadai bahkan BPK juga menemukan masih belum memahami teknis pengawasan atas pemanfaatan fasilitas PPH Badan. Ini menjadi catatan tersendiri untuk DJP,” tegas Anis.

Selanjutnya, Anis juga mengungkap catatan BPK terkait piutang pajak macet sebesar 20,84 Trilyun, yang belum dilakukan tindak penagihan yang memadai. BPK sudah merekomendasikan agar pemerintah melakukan inventarisasi atas piutang macet, kemudian melakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021 yang menyebutkan terdapat 27 temuan pemeriksaan, Anis menegaskan bahwa temuan itu harus tetap ditindaklanjuti. Walaupun ditegaskan tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan, tetapi kami ingin hal ini tetap ditindaklanjuti

Tanggapi RUU APBN 2023, Fraksi PKS: Masih Banyak Catatan Kritis yang Perlu Diperhatikan!

KUTIPAN

Jakarta (23/08) --- Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS terhadap RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan yang diajukan Pemerintah.

Menurutnya, secara umum, RAPBN tahun 2023 yang diajukan masih menunjukkan tidak ada yang istimewa dari target Pemerintah dalam menunaikan janji-janji ekonominya

"RAPBN tahun 2023 membu-tuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat di masa ketidakpastian global ini, serta berdampak le-bih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1", ujar Sukamta.

Fraksi PKS, imbuhnya, me-ngingatkan bahwa APBN 2023 adalah APBN yang harus kembali kepada kondisi target defisit di bawah 3 persen dari PDB.

"Hal ini sebagaimana amanah Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara", lanjutnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut bahwa pemerin-tah cenderung pesimis terhadap kondisi ekonomi tahun 2023.

"Target pertumbuhan yang ditetapkan hanya 5,3 persen dari interval 5,3-5,9 persen pada kesepakatan sebelumnya. Padahal, potensi Indonesia untuk bisa tumbuh tinggi pada 2023 cukup terbuka, dengan memaksimalkan kontribusi ekonomi domestik", ujarnya lagi.

Sementara itu, Fraksi PKS pun memberi peringatan

terhadap pemerintah terkait akumulasi utang saat ini yang sudah mencapai Rp7.163 triliun yang setara dengan 37,91 persen terhadap PDB.

"Pada 2014 jumlah akumulasi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen. Dengan demikian, pemerintah hanya dalam rentang 9 tahun telah menambahkan lebih dari 200 persen dari jumlah utang sebelumnya. Saat ini, utang pemerintah telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR), rekomendasi IMF 25 persen-35 persen terhadap PDB", imbuhnya.

Terakhir, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mencapai target-target asumsi makroekonomi 2023, sebagai perwujudan janji pemerintah kepada rakyat.

"Tidak tercapainya target-target terdahulu menyebabkan ekonomi sulit pulih dari pandemi covid-19 serta semakin terjebak pada negara berpendapatan menengah



H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Badan Anggaran DPR RI

Tidak tercapainya target-target terdahulu menyebabkan ekonomi sulit pulih dari pandemi covid-19 serta semakin terjebak pada negara berpendapatan menengah (middle income). Diperlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen per tahun agar Indonesia lulus dari middle income trap

(middle income). Diperlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen per tahun agar Indonesia lulus dari middle income trap. Sementara itu,

realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015-2021 masih jauh dari target tersebut", pungkasnya



Anggota Banggar FPKS Sampaikan Alasan Tolak Kenaikan Harga BBM

KUTIPAN

Jakarta (23/08) --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mencabut subsidi energi BBM sudah lebih dari Rp 500 triliun. Anggota Banggar dari Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyatakan menolak kenaikan BBM.

"Alasan Pemerintah bahwa subsidi BBM tahun 2022 sudah mencapai Rp 500 triliun itu tidak benar. Subsidi energi tahun 2022 sebesar Rp 208,9 T itupun terdiri dari subsidi BBM dan LPG Pertamina 149,4 T serta subsidi listrik 59,6 T. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang," tegasnya.

Lalu, imbuhan Sukamta, sisanya dari mana? Sisanya Rp 343 triliun untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp 234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp 108,4 triliun.

"Kompensasi ini alasannya untuk mendukung operasional Pertamina dan PLN dalam menyediakan BBM subsidi. Jadi ini subsidi ke Pertamina dan

PLN bukan ke rakyat," ungkap Sukamta.

Mirisnya, kata Sukamta, kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagian besar untuk membayar utang BUMN tersebut dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusahaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen.

"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp 29 triliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," tegasnya. Jadi, lanjut Sukamta, Pemerintah ini bikin pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.

"Dalihnya terlalu banyak

subsidi BBM yang mencapai Rp 500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini.

"Berdasarkan fakta-fakta ini kami PKS menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya."

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, ungkap Sukamta, merupakan kebijakan paling mudah. Padahal masih banyak strategi yang bisa dilakukan.

"Misalnya mendorong penurunan konsumsi BBM dengan mendorong peningkatan layanan transportasi umum, peningkatan pajak kendaraan mewah, mendorong penggunaan mobil listrik," urainya.

Bisa juga, kata Sukamta, dengan subsidi terbatas. Misalnya berdasarkan data GAIK-INDO dari rata-rata penjualan kendaraan roda empat dan lebih mulai dari LCGC, truk, bus, pickup mencapai 40 persen dari total penjualan.

"Segmen inilah yang



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pemerintah ini bikin pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat. Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp 500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN"

seharusnya Pemerintah tetap memberikan subsidi kepada kendaraan yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan kelas menengah ke bawah," tuturnya.

Cara pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kemampuan masyarakat bawah yang menggunakan pertalite

untuk transportasi kendaraan bermotor, kata Sukamta, akan menambah sengsara rakyat di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi.

"Dampaknya jumlah angka kemiskinan, gizi buruk akan meningkat di kemudian hari," tutup Sukamta.

Fraksi PKS Sampaikan Sejumlah Catatan Penting Soal Pertanggungjawaban atas APBN 2021

KUTIPAN

Jakarta (01/09) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mewakili Fraksi PKS menyampaikan pendapat mini dalam rapat kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Diah mengatakan, secara umum Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2021 masih belum memuaskan, sehingga berdampak kurang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, terlebih dalam

masa pandemi yang berat. Seharusnya APBN menjadi motor utama kebijakan ekonomi yang optimal untuk menjaga terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi," ungkap Diah.

Selanjutnya, kata Anggota DPR RI Dapil Jabar II ini, dalam menyikapi Hasil Pembicaraan terkait Rancangan Undang-undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan.

"Fraksi PKS menilai bahwa tidak tercapainya target pertumbuhan tahun 2021 semakin menjauhkan harapan untuk bisa keluar dari middle income trap lebih cepat. Pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi sebelum bonus demografi berakhir pada tahun 2036," jelas Diah.

Fraksi PKS, kata Diah berpendapat bahwa risiko kesinambungan fiskal cukup tinggi yang terlihat dari masih tingginya defisit keseimbangan primer tahun 2021 yang mencapai Rp431,57 triliun atau 2,54 persen dari PDB.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa kenaikan rasio utang pada 2021 menjadi sebesar 40,74 persen dari PDB menjadi sinyal kurang baik. Debt Service Ratio (DSR) Indonesia berada pada 41,4% artinya bahwa Utang saat ini telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio sebesar 25%- 35%," jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dipl.Ing. Hj. **DIAH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Fraksi PKS mendesak Pemerintahan untuk lebih progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. Fraksi PKS menilai turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional menjadi sebesar 6,49 persen pada Agustus 2021 jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,07 persen belum cukup memadai, karena masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 5 persen,"



Interupsi Rapat Paripurna, Aleg PKS: Pemerintah Harus Perhatikan Daerah dan Jangan Buat Susah Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (23/08) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli, meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah dan kebutuhan dasar rakyat dalam postur APBN 2023. Hal itu disampaikan saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08) tadi.

"Saya ingin menyoroti sedikit tentang Pidato RUU TA APBN 2023 dan Nota Keuangan. Transfer ke daerah sangat kecil. Membuat daerah ketergantungan dan tertinggal. Saya melihat, ini luar biasa membuat daerah menjadi seperti pengemis jadinya. Barangkali ini perlu menjadi evaluasi, bagaimana daerah itu harus diberi kemapanan", ungkap Rafli.

Menurut Rafli, rincinan belanja negara dalam RAPBN

2023 yang direncanakan sebesar Rp3.014,7 Triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun, perlu dievaluasi.

"Kalau dilihat dari postur anggaran, sampai 2.230 triliun untuk belanja pemerintah pusat, ini sudah menjadi seperti sangat sentralistik", ujarnya.

Selain itu, senada dengan Mulyanto, Rafli pun kembali menegaskan penolakan PKS

terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Masyarakat kita belum selesai dari krisis akibat pandemi covid-19. Namun, sudah muncul berita baru yang tak sedap, yakni Pemerintah akan menaikkan harga BBM. Di mana-mana masyarakat sudah mengeluh. Jika Pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak, cukup tidak membuat rakyat menderita. Rakyat sudah pontang-panting, rakyat sudah melarat. Jika BBM dinaikkan dalam kondisi seperti saat ini, tentu hal itu merupakan sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat", pungkasnya.



RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

"Masyarakat kita belum selesai dari krisis akibat pandemi covid-19. Namun, sudah muncul berita baru yang tak sedap, yakni Pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Di mana-mana masyarakat sudah mengeluh. Jika Pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak, cukup tidak membuat rakyat menderita"



Interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, Mulyanto: PKS Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

KUTIPAN

Jakarta (23/08) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah. Hal itu disampaikannya saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08) tadi.

"Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19", ungkap Mulyanto.

Menurutnya, inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi. Hal itu berpotensi makin parah apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Masyarakat hari ini

menderita inflasi sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. Gubernur Bank Indonesia bilang, seharusnya yang tertinggi hanya 5-6 persen. Tapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan

inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat", ujarnya lagi.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Inbang ini pun menyoroti bahwa harga minyak sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir.

"Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari USD 140 per barel menjadi hari ini sebesar USD 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna", tegasnya.

Mengakhiri interupsinya, Mulyanto meminta Pemerintah untuk menghemat anggaran dengan menghentikan pembangunan proyek yang dinilainya tak perlu, seperti IKN baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. Gubernur Bank Indonesia bilang, seharusnya yang tertinggi hanya 5-6 persen. Tapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat",



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





Hadiri Peringatan HUT RI di Dapil, Rofik Berikan Semangat Kader untuk Kemenangan PKS 2024

KUTIPAN

Banjarnegara (31/08) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto memberikan semangat para kader dan simpatisan PKS di Banjarnegara untuk kemenangan PKS dalam pemilu 2024, di Alun-alun Banjarnegara, Minggu (28/08/2022).

"Mari kita songsong tahun 2024 sebagai tahun kemenangan PKS di Banjarnegara. Siap memenangkan PKS di Banjarnegara tahun 2024?" tanya Rofik dengan suara lantang kepada para kader yang sedang mengikuti Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77.

"Siap!" jawab kader serempak sambil mengepalkan tangan ke atas.

Untuk lebih menambah semangat lagi, Rofik kembali melontarkan pertanyaan yang sama kepada para kader.

"Siap!" jawab mereka dengan suara lebih lantang.

Rofik Hananto meminta kepada kader untuk menjadikan momentum hari itu sebagai

starting poin untuk kemenangan PKS di 2024. Menjadikan titik mula untuk meyakinkan masyarakat Banjarnegara bahwa PKS hadir bersama rakyat.

"Di tengah semangat HUT Ke 77 Kemerdekaan RI, kita jadikan hari ini sebagai starting poin, sebagai titik mula meyakinkan masyarakat bahwa PKS hadir untuk mensejahterakan rakyat, membantu rakyat Banjarnegara agar lebih maju, makmur dan lebih sejahtera," ujar Rofik.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 itu menambahkan, PKS hadir bukan untuk tujuan yang lain. Tetapi PKS hadir dengan niat yang tulus ikhlas, dan niat untuk menggapai

rahmat, barokah dan maghfiroh dari Allah. Karena itu PKS berjuang keras bagaimana agar amanat ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Jika niat sudah dicanangkan, sekarang saatnya kita menggapainya dengan upaya maksimal agar pertolongan Allah hadir. Seperti Siti Maryam saat lapar berikhtiar menggoyang-goyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh dan bisa dimakan," ujarnya.

Menurut Rofik Hananto, bisa jadi impian kita tidak berbanding lurus dengan hasil. Tetapi melakukan ikhtiar adalah kewajiban dan menjadi hak Allah untuk memberikan kemenangan bagi kita.

"Mari warga PKS di Banjarnegara, kita jemput kemenangan dengan berjuang. PKS Banjarnegara menang untuk rakyat. Menang untuk mengubah kepada rakyat. Kita tunjukkan kepada rakyat dengan senyum yang menandakan kita bahagia. Karena orang yang bahagia itu bisa membahagiakan orang lain," katanya.



H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Jika niat sudah dicanangkan, sekarang saatnya kita menggapainya dengan upaya maksimal agar pertolongan Allah hadir. Seperti Siti Maryam saat lapar berikhtiar menggoyang-goyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh dan bisa dimakan,"

Kegiatan yang diinisiasi DPD PKS Banjarnegara itu dihadiri Ketua DPD PKS Banjarnegara Broto Agung Saputro, Anggota DPRD Kab. Banjarnegara F-PKS dan

anggota DPRD Jawa Tengah FPKS Tri Mulyantoro. Berbagai kegiatan digelar dalam kesempatan tersebut. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Gelar 'RH Digital Marketing Boot Camp

Rofik Hananto Gembleng Generasi Milenial di Dapil

KUTIPAN

Purbalingga (29/08) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menggembleng generasi milenial di Dapil.

Sebanyak 60 anak muda mengikuti RH Digital Marketing Boot Camp Batch 1 di Aula Halalmart Purbalingga yang digelar selama 2 hari tanggal (27-28/08/2022).

"Bahagia sekali mendampingi anak-anak muda hari ini. Anak muda itu punya energi yang kuat. Kegiatan ini untuk mengakomodir energi yang tak terbatas itu," katanya saat membuka kegiatan kerjasama Fraksi PKS DPR RI dan PT Erdigma Indonesia. Legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 mengatakan, Indonesia dikenal sebagai negara penuh berkah. Salah satunya adalah berkah demografi. Karena Indonesia memiliki surplus demografi yang luar biasa.

Rofik menambahkan, surplus demografi menjadi berkah, bukan musibah. Karena negara yang punya bonus ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Anak muda itu powerful, high

energy achiever.

"Makanya harus diarahkan energinya agar menjadi anak muda yang penuh karya, bukan anak muda yang berbahaya. Karena itu perlu skill yang membuat berkarya dan produktif. Pelatihan RH Digital Marketing Bootcamp ini melatih anak muda menjadi anak muda yang penuh karya, penuh prestasi. Sehingga energi mereka tersalurkan untuk hal-hal yang positif," katanya.

Rofik menuturkan, usia milenial adalah usia yang produktif. Mereka menjadi bagian tonggak penyangga bangsa. Satu dasawarsa ke depan negara ini akan diwariskan kepada mereka.

"Purbalingga itu high quality karena kita adalah keturunan Jenderal Besar Sudirman. Beliau lahir di Purbalingga. Karena itu jadilah orang yang hebat yang akan menjadi salah satu pilar utama untuk bangkit lebih kuat, pulih

lebih cepat," tandasnya.

Rofik mengaku senang sekali dengan kegiatan itu. "Saya senang sekali, Selamat belajar. Jangan biarkan waktu muda dengan luntang luntung tidak jelas. Manfaatkan waktu 2 hari ini dengan sebaik-baiknya," pesannya kepada seluruh peserta.

Ketua panitia Basyirun menuturkan, di era sekarang, anak yang berbau konvensional akan terkikis. Kalah dengan yang berbau digital. Seperti halnya Erdigma, sebuah perusahaan digital marketing yang baru berusia kurang 2 tahun tetapi sudah memiliki lebih dari 200 karyawan.

"Yang tadinya belum tahu digital marketing itu apa, bagaimana memanfaatkan medsos agar jadi duit, akan diajarkan oleh para mentor selama kegiatan ini. Setelah kegiatan ini kita berharap peserta punya digital marketing sendiri atau bergabung dengan PT Erdigma," katanya.

**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Surplus demografi menjadi berkah, bukan musibah. Karena negara yang punya bonus ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Anak muda itu powerful, high energy achiever. Makanya harus diarahkan energinya agar menjadi anak muda yang penuh karya, bukan anak muda yang berbahaya. Karena itu perlu skill yang membuat berkarya dan produktif"

Di Dapil, Hermanto Ikuti Aksi Bersih Pantai Padang

KUTIPAN

Padang (29/08) --- Anggota DPR dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan ikut dalam kegiatan bersih-bersih pantai,

yang diadakan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Kegiatan dilakukan Pantai Purus, Ahad (28/08).

"Padang dikaruniai pantai yang indah. Pantai Padang sudah menjadi ruang terbuka publik yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Agar pantai tetap indah dan enak dipandang mata maka harus dijaga kebersihannya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurut Hermanto, PKS sebagai bagian dari komunitas masyarakat Padang merasa turut bertanggung jawab menjaga kebersihan pantai.

"Sebagai wujud tanggung jawab tersebut sekaligus memperingati HUT RI ke-77, pengurus PKS Sumatera Barat dan Padang serta masyarakat

mengadakan aksi bersih-bersih pantai dengan cara memungut sampai di pinggir pantai," tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

"Kami berharap semangat PKS menjaga kebersihan ini diikuti oleh kalangan masyarakat lainnya," tambah Hermanto.

Kegiatan bersih-bersih pantai ini, katanya, diawali dengan kegiatan senam massal.

"Jadi sebelum membersihkan pantai, para peserta kegiatan dikondisikan agar terbiasa berolahraga untuk kesehatan dan kebugaran masing-masing," jelas Hermanto.

Hadir dalam kegiatan tersebut istri Gubernur Sumbar Harneli Bahar, Wakil Ketua DPW PKS Sumatera Barat Ulyadi, Sekretaris umum DPW PKS Sumatera Barat Rahmat Saleh dan Ketua DPD PKS Kota Padang Muharlion.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Padang dikaruniai pantai yang indah. Pantai Padang sudah menjadi ruang terbuka publik yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Agar pantai tetap indah dan enak dipandang mata maka harus dijaga kebersihannya,"



77 Tahun Indonesia Merdeka, Netty Gelar Gebyar Senam Nusantara

KUTIPAN

Cirebon (28/08) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani bersama Gema Keadilan Kabupaten Cirebon akan menggelar senam nusantara dalam rangka 77 tahun Indonesia merdeka.

Acara Gebyar 77 tahun kemerdekaan ini diselenggarakan di Stadion Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon pada Minggu (28/08/2022).

"Acara ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat persaudaraan yang erat antar masyarakat. Sebagaimana momentum kemerdekaan yang menjadi simbol solidaritas para pejuang bangsa" kata Netty.

Dengan tetap mematuhi prokes yang berlaku, gebyar Kemerdekaan kali ini menyelenggarakan kegiatan senam yang dihadiri oleh berbagai kelompok senam dan komunitas kesehatan Cirebon lainnya.

Selain senam nusantara, gebyar kemerdekaan kali ini akan diramaikan dengan sejumlah acara lain. Salah satunya adalah penampilan

special dari penyanyi Dian Anic, the special one of Pantura.

Makna kemerdekaan, menurut Netty, tercermin dari semangat dan antusias para peserta yang hadir setelah dua tahun sebelumnya merayakan kemerdekaan dari rumah karena Pandemi Covid-19.

"Perayaan kemerdekaan yang identik dengan kebersamaan sempat tergeser karena pandemi yang mengharuskan warga berkegiatan secara daring dari rumah. Maka dari itu tidak heran bila warga bergembira dan antusias menghadiri kegiatan hiburan seperti ini" terangnya.

Gebyar 77 tahun kemerdekaan ini juga menyediakan pos layanan kesehatan, seperti layanan pemeriksaan kadar gula darah,

asam urat dan kolesterol gratis, serta layanan donor darah bagi peserta yang berminat.

"Tema gebyar kemerdekaan kali ini adalah kesehatan dan olahraga. Kita berharap ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat agar semakin sadar dan peduli dengan kesehatan dan kebugaran diri. Pada akhirnya akan terbangun kewaspadaan dalam mencegah timbulnya penyakit," katanya.

Untuk menambah keseruan acara dan menggembirakan peserta, Netty membagikan sejumlah doorprize berupa barang elektronik seperti; kulkas, televisi, kompor gas, dan lain-lain. Kelompok senam terbaik dan ter unik juga akan diajak makan siang bersama Netty.

"Kebersamaan yang ingin dibangun dan ditumbuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ajang rutinan yang membuka pintu silaturahmi dan memupuk semangat guyub yang sesungguhnya. Karena rasa guyub itu juga harus difasilitasi agar tetap terawat dan tidak mudah tercerai-berai." tutup Netty



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Kebersamaan yang ingin dibangun dan ditumbuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ajang rutinan yang membuka pintu silaturahmi dan memupuk semangat guyub yang sesungguhnya. Karena rasa guyub itu juga harus difasilitasi agar tetap terawat dan tidak mudah tercerai-berai."

PROGRAM UNGGULAN FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atarakif Substantif

#MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.

Rafli Ajak BUMN Pariwisata Berkontribusi Bangun Kawasan Sabang

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli, mengajak BUMN Pariwisata rintis perhotelan di Sabang.

Menurutnya langkah tersebut sebagai pemicu pembangunan dikawasan yang merupakan titik OKM Indonesia, hal itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BPKS, BP Batam, KPPU dan BSN, di Jakarta, Kamis (26/08).

"Kementerian BUMN mungkin bisa membangun Perhotelan sebagai pemicu supaya bergerak dan berdampak kepada lain lainnya. Kementerian BUMN sangat banyak bisa kita inklud dan bisa kita masukan ke Sabang, mungkin juga PUPR dan sebagainya, mungkin ini bisa dilakukan lebih serius dan continue agar ke depan Sabang bisa bergerak," ungkap Rafli

"Kita sudah ke sabang, kita lihat semakin hari semakin menciut, jika kita bandingkan BPKS dengan lembaga serupa yakni BP Batam yang setara

secara kelembagaan, Perbedaannya Dewan Kawasan BP Batam diisi oleh sejumlah menteri namun BPKS diisi oleh unsur yang semuanya dari Aceh.

Ada harapan kita di Komisi VI, Berharap APBN mungkin perlu ikhtiar lebih diperkuat lagi, bahkan kementerian mungkin bisa bersinergi, termasuk BP Batam berkolaborasi membangun OKM Indonesia yang terletak di Aceh tersebut. Banyak filosofi bahwa aceh sebagai Okm indonesia, namun miris jika kita lihat dari anggaran bpks yang hanya 70 milyar dibandingkan BP Batam mencapai 2 Triliun. Ini sedih, harapan saya marilah kita melihat Sabang. Bagaimana sabang ke depan bisa kita perhatikan," ujar Rafli

Senada itu Herman Khaeron juga mendukung pembangunan Sabang, menurutnya banyak harapan

masyarakat disana.

"Misalkan pengembangan yang lambat. Bicara titik OKM di Aceh, bukan hanya di Aceh, menunjukkan belum ada pembangunan yg signifikan apalagi terkait kesejahteraan rakyat. Memang lagi lagi klasik dengan alasan tidak adanya kemampuan keuangan untuk menyelesaikan itu. Tetapi misalkan bisa fokus aja, BPKS itu kan anggaran nya, 70 milyar. Memang kecil, tapi kalau disinergikan dengan BUMN lain

, menurut saya dengan daya tarik tertentu, dan sekarang BPKS bisa membuat promosi yang bisa jadi daya tarik, hunian hotel dan penginapan lain sebagainya, dengan transportasi yang bisa juga dikerjasamakan dengan BUMN, akan jadi destinasi yang menjanjikan ke depan . jadi saya dukung, Komisi VI mendukung penuh pengembangan BPKS," Ujar Herman, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI

Rapat dengar pendapat yang berlangsung siang tadi, dihadiri para Anggota DPR RI Komisi VI dan Para Pimpinan mitra kerjanya, terdiri dari Kepala BPKS, BP Batam, KPPU dan BSN.



RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

"Kementerian BUMN mungkin bisa membangun Perhotelan sebagai pemicu supaya bergerak dan berdampak kepada lain lainnya. Kementerian BUMN sangat banyak bisa kita inklud dan bisa kita masukan ke Sabang, mungkin juga PUPR dan sebagainya, mungkin ini bisa dilakukan lebih serius dan continue agar ke depan Sabang bisa bergerak,"

Di Kabupaten 50 Kota, Nevi Zuairina Proyeksikan Bantuan Irigasi Pertanian di Dua Nagari

KUTIPAN

Kabupaten Limapuluh Kota (20/08) --- Anggota DPR RI dapil Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, di Kabupaten 50 Kota akan mengadvokasikan pembangunan Irigasi tersier yang salah satunya diperuntukkan aktivitas pertanian. Dalam waktu dekat ini, ada dua titik irigasi di dua nagari.

Nevi melakukan lawatan ke dua nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban guna menjangkau serta menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kunjungan saya kali ini sengaja dilaksanakan di luar kunjungan kerja resmi anggota DPR RI, dimaksudkan agar dapat lebih membaaur dengan masyarakat. Namun demikian, memang sudah kewajiban Anggota DPR untuk selalu mendampingi daerah pemilihannya dengan terjun ke masyarakat agar selalu mendapatkan info terbaru kejadian dan kebutuhan

masyarakat yang diwakili sehingga menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah selaku eksekutif," kata Nevi usai berdialog dengan tokoh masyarakat.

Anggota DPR RI yang kini duduk di Komisi VI ini menerangkan, kunjungan dua titik irigasi ini Lokasi pertama yakni kawasan wisata agro bisnis 'Ngalau Tabuak' yang terletak di Nagari Sitanang.

Disana, Nevi disambut oleh tiga wali nagari, yakni Wali Nagari Sitanang, Hardison Dt Tulahir, Wali Nagari Batu Payuang, Al Aswandi serta Wali Nagari Ampalu, Asrizal hingga

puluhan masyarakat.

Pada kunjungan ini, legislator perempuan dari PKS ini tampak didampingi oleh anggota DPRD Limapuluh Kota fraksi PKS, Zukron.

Adapun lokasi kedua yang dikunjungi Nevi Zuairina, yakni saluran irigasi pertanian di salah satu jorong Nagari Batu Payuang. Disana, Al Aswandi menyebut, saluran irigasi sepanjang hampir ratusan meter mengering, akibat bagian sisi-sisinya mengalami banyak kebocoran.

"Tali bandar irigasi ini sudah banyak bocor dan harus segera dilakukan perbaikan. Masyarakat kita yang lahan sawahnya berada di sini jadi kesulitan bertani, dan terpaksa menanam jagung, karena tidak bisa memanfaatkan air irigasi untuk sawah," Jelas Nevi berdasar keterangan yang ia dapatkan dari warga dan tokoh setempat yang berada di perbatasan Sumbar-Riau.

Mendengar masukan wali nagari, Nevi Zuairina yang merupakan anggota Legislator Sumatera Barat, mengaku bakal memperjuangkan aspirasi



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Tali bandar irigasi ini sudah banyak bocor dan harus segera dilakukan perbaikan. Masyarakat kita yang lahan sawahnya berada di sini jadi kesulitan bertani, dan terpaksa menanam jagung, karena tidak bisa memanfaatkan air irigasi untuk sawah"

tokoh masyarakat dan para wali nagari khususnya di kecamatan Lareh Sago Halaban. Hal tersebut, menjadi tanggung jawab baginya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak konstituen.

"Ini akan saya jadikan catatan untuk usulan prioritas

ke pemerintah serta kementerian terkait, karena tadi sudah kita lihat sendiri bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan, InsyaAllah nanti kita proyeksikan bantuan buat pengerjaan proyek jalan dan irigasi," tutup Nevi Zuairina.

Junaidi Salurkan Sembako untuk Masyarakat Lampung Tengah

KUTIPAN

Lampung (21/08) – Bentuk rasa peduli serta sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat imbas dari pandemi Covid-19,

khususnya pada warga Desa Rukti Harjo dan Desa Gunung Batin kabupaten Lampung Tengah, Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly membagikan 200 paket sembako untuk masyarakat, Ahad (21/08).

Junaidi Auly, menyampaikan dalam sambutannya bahwa meskiuun kini pandemi Covid-19 sudah tidak separah dua tahun yang lalu, namun masih terasa imbasnya terhadap perekonomian masyarakat, maka dari itu dirinya berkunjung ke berbagai wilayah, selain untuk silaturahmi pada masyarakat dirinya juga turut membantu pada masyarakat berupa paket sembako.

"Kami hadir ke sini ingin bersilaturahmi kepada masyarakat sekaligus memberikan sedikit bantuan

berupa sembako bagi warga yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa sedikit membantu masyarakat yang ada disini", kata Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi mengatakan, agar masyarakat tidak takut terhadap gejala perekonomian yang sedang terjadi, inilah saatnya kita bangkit untuk lebih kuat, saling bahu membahu untuk lebih maju.

"Penting bagi kita menciptakan ide-ide kreatif dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk kembali meningkatkan taraf perekonomian kita. Banyak cara dan bisa kita diskusikan bersama", tutup putra daerah Lampung ini.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Kami hadir ke sini ingin bersilaturahmi kepada masyarakat sekaligus memberikan sedikit bantuan berupa sembako bagi warga yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa sedikit membantu masyarakat yang ada disini",



Tampil Dengan Logo Baru, Nur Azizah Tamhid: PKS Terbuka Bagi Semua Kalangan

KUTIPAN

Anggota DPR RI Fraksi PKS mengikuti kegiatan Flash Mob yaitu pengenalan logo baru PKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Raya Bogor tepatnya di sekitaran pasar Pal Tugu, Cimanggis, Depok.

Pantau di lapangan para kader PKS tanpak berdiri memanjang disebelah kiri dan kanan jalan baik dari arah Jakarta dan Bogor. Pada momen tersebut para kader ada yang membawa banner dan beberapa spanduk yang mengenalkan logo baru PKS. Tak hanya itu para kader juga membagikan bendera merah putih kecil kepada para pengendara.

Nur Azizah Tamhid selaku Anggota DPR RI dapil Depok-Bekasi menuturkan kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya ialah mengenalkan logo baru PKS kepada masyarakat Indonesia terutama di Kota Depok.

" Kita ingin mengenakan logo baru PKS kepada masyarakat Kota Depok. Dengan hal ini PKS bukan partai tertutup tapi merangkum seluruh elemen anak bangsa,"ujarnya. Sabtu (20/8/2022).

Menurutnya sesuai dengan RPJMN bahwa PKS memiliki visi yang sama yaitu membantu masyarakat tanpa mengenal perbedaan. Untuk itu dengan adanya logo baru ini dan HUT kemerdekaan RI PKS ingin terbuka bagi siapapun.

" Kami akan melayani semua masyarakat Indonesia tanpa mengenal ras, suku, dan agama. PKS adalah partai yang

sudah terbukti menjadi partai yang selalu bersama rakyat,"katanya.

Sementara itu juru bicara Ibu Nur Azizah Tamhid, Ahmad memaparkan logo baru ini sebagai tanda bahwa PKS ingin tampil lebih terbuka bagi semua kalangan.

" Kami ingin menampilkan wajah baru PKS. Makanya kegiatan hari ini yaitu mengenalkan logo bagi PKS masyarakat,"katanya.

Selain itu PKS juga akan mendorong lahirnya pahlawan - pahlawan baru di berbagai bidang baik itu ekonomi, pendidikan, tehnik, dan lainnya.

" Kebetulan karena ini masih momen Hut PKS berharap nanti lahir pahlawan baru yang ahli diberbagai bidang,"bebernya.

Dimempat yang sama, Ketua DPC PKS Cimanggis menuturkan kegiatan ini adalah salah satu upaya PKS memberikan warna baru kepada masyarakat.

" Warna baru yaitu oranye menandakan PKS ingin lebih terbuka. Apalagi di era saat ini generasi muda populasinya cukup besar, nah PKS ini mendorong potensi itu sehingga generasi muda lebih produktif dan maju," pungkasnya.



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya ialah mengenalkan logo baru PKS kepada masyarakat Indonesia terutama di Kota Depok. Kita ingin mengenakan logo baru PKS kepada masyarakat Kota Depok. Dengan hal ini PKS bukan partai tertutup tapi merangkum seluruh elemen anak bangsa



Silaturahmi Anggota Apdesi Di Dapil, Aleg PKS Terima Masukan Dan Harapan Kepala Desa

KUTIPAN

Tasikmalaya (19/08) --- Jelang akhir reses Masa Sidang V Tahun 2021-2022, Toriq Hidayat menerima pengurus Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di kediamannya.

Pertemuan bertujuan sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi kepada Anggota Komisi V DPR RI sebagai rekan kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Silaturahmi dengan para Kepala Desa (Kades) rutin dilakukan di masa reses. Umumnya momen ini digunakan untuk menyerap aspirasi mereka. Baik berupa pengajuan program infrastruktur maupun penyampaian kendala-kendala penerapan aturan yang terkait dengan desa," ujar Politisi PKS asal Tasikmalaya.

Toriq menyebutkan, sesuai tupoksinya ia bertanggunjawab atas pengawasan implementasi kebijakan dilapangan.

Adakalanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait tidak tersosialisasikan dengan baik kepada Aparat Desa. Akibatnya kebijakan tersebut lambat diimplementasikan.

"Contoh, pengurus Apdesi meminta agar dana bencana bisa dari dana desa. Padahal tahun lalu, pada tanggal 24 Agustus 2021 Kemendes PDTT telah mengeluarkan peraturan No. 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, bahwa dana desa boleh digunakan untuk penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa," jelasnya.

Pengurus Apdesi juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa. Antara lain,

sebut Toriq, pertama aturan operasional desa yang belum disahkan. Hal ini sebagai upaya perlindungan hukum atas penggunaan dana desa atas kebutuhan mendesak desa, seperti kebutuhan kendaraan desa, pembangunan dan perbaikan gedung desa dan lainnya.

"Kedua Aplikasi SIPD desa sulit diakses akibat sinyal yang belum stabil bahkan tidak ada. Ketiga, LSM dan oknum berkedok mengatasnamakan media yang seringkali melakukan pemerasan, dan keempat permasalahan gesekan sesama P3-TGAI (Petani Pemakai Air-Tata Guna Air Irigasi)," ujarnya.

Menurut Toriq dalam hal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa akibat kurangnya sosialisasi dan salah persepsi, ia berupaya membantu memberikan penjelasan. Namun bila disebabkan belum ada aturannya, maka ia akan melakukan advokasi dengan menyampaikannya kepada K/L terkait.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Silaturahmi dengan para Kepala Desa (Kades) rutin dilakukan di masa reses. Umumnya momen ini digunakan untuk menyerap aspirasi mereka. Baik berupa pengajuan program infrastruktur maupun penyampaian kendala-kendala penerapan aturan yang terkait dengan desa"



Ratusan Penulis Mendaftar Ikut Lomba Karya Tulis Nasir Djamil

KUTIPAN

Banda Aceh (19/08) --- Lomba Menulis Milenial Merdeka Bersama Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil telah ditutup penerimaan naskah/tulisan peserta mulai Rabu, 17 Agustus 2022 pukul 00:00 WIB.

Tim penilai (dewan juri) masih dalam proses memilih nama-nama pemenang hingga pengumuman nantinya pada Sabtu, 20 Agustus 2022 (besok). Adakah karya tulis Anda yang jadi pemenang?

Sebelumnya, pendaftaran lomba menulis ini dibuka sejak 1-17 Agustus 2022. Lomba yang ditujukan bagi milenial khusus Aceh jenjang usia maksimal 35 tahun yang berdomisili dan/atau memiliki KTP Aceh.

Dengan mengambil tema terkait peran dan tantangan milenial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dibagi beberapa sub-tema yaitu: disrupsi digital dan literasi digital kaum milenial, pengaruh kaum milenial terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan

publik, bonus demografi antara 'berkah' atau 'musibah' ? dan politik milenial ditengah demokrasi prosedural.

Dalam perlombaan ini yang menjadi tim penilai (dewan juri) adalah Linda Christanty, seorang penulis dan jurnalis yang tidak asing namanya di level nasional yang karya-karyanya telah mendapat banyak penghargaan, termasuk SEA Write Award dari Thailand. Nama lainnya adalah Maimun Saleh wartawan asal Aceh yang aktif bergabung di komunitas pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, saat ini menjadi Pemimpin Redaksi di salah satu media.

Tim penilai akan memilih pemenang lomba untuk Juara I, II, dan III serta Harapan I, II, dan III. Setiap peserta yang

mengirimkan tulisan akan diberikan penghargaan berupa sertifikat ke masing-masing peserta.

Sebagai pihak penyelenggara kegiatan lomba, Nasir Djamil sangat mengapresiasi peserta yang telah berpartisipasi, menaruh minat, dan mengirimkan tulisan terbaiknya. Atensi yang besar dan antusias peserta dilihat dari banyaknya peserta yang mendaftar, melebihi 200 peserta.

Namun, sayangnya karena durasi waktu yang terbatas tidak semua peserta dapat menyelesaikan tulisan mereka, pihak panitia hanya menerima sebanyak 108 naskah/tulisan dari 200 yang mendaftar.

“Saya menghimbau kepada Pemerintah Aceh baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh untuk lebih peduli dan memfasilitasi milenial Aceh, khususnya dalam bidang menulis” Kata Nasir.

Menurutnya, milenial Aceh membutuhkan dorongan positif dari Pemerintah setempat agar karya yang lahir menjadi sejarah yang dicatat rapi melalui tulisan yang akan dibaca oleh generasi mendatang.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Saya menghimbau kepada Pemerintah Aceh baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh untuk lebih peduli dan memfasilitasi milenial Aceh, khususnya dalam bidang menulis. milenial Aceh membutuhkan dorongan positif dari Pemerintah setempat agar karya yang lahir menjadi sejarah yang dicatat rapi melalui tulisan yang akan dibaca oleh generasi mendatang.”



Berada di Dapil, Diah Nurwitasari Hadiri Undangan dari Komunitas Paguron Pencak Silat

KUTIPAN

Kabupaten Bandung Barat (29/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari mengunjungi komunitas Paguron Pencak Silat di RW 15 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Kunjungan Diah kali ini didampingi oleh Nur Djulaeha, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PKS yang disambut oleh para atlet remaja dan anak-anak Paguron Pencak Silat (PPS) tersebut.

"Saya sangat senang pagi ini bisa bertemu dan disambut anak-anak dan remaja anggota Paguron Pencak Silat di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah ini," ungkap Diah saat membuka sambutannya.

Di tengah gempuran budaya luar yang luar biasa lewat medsos, lanjut Diah, ternyata masih banyak anak-anak bangsa yang masih

mencintai dan menjunjung tinggi budaya lokal seperti pencak silat ini. Hal seperti ini harus kita apresiasi.

"Kehadiran saya disini, yang pertama adalah menghaturkan silaturahmi saya sebagai wakil rakyat, wakil Bapak Ibu dan Akang Teteh semuanya di DPR-RI," ujar Diah.

Dan yang kedua, imbuhnya, adalah sebagai bentuk kecintaan dan apresiasi terhadap budaya bangsa salah satunya pencak silat ini. Sebuah budaya lokal yang telah diakui dunia.

"Tetaplah bangga dan mencintai pencak silat ini

sebagai perwujudan cinta kita kepada Indonesia. Apalagi pencak silat ini sudah dipertandingkan dalam even-even resmi kompetisi olah raga tingkat dunia. Mudah-mudahan anak-anak dan para pemuda di paguron ini bisa berprestasi bagi Indonesia lewat pencak silat ini," pungkas Diah.

Diakhir acara, Diah menyerahkan sejumlah bantuan sebagai bentuk apresiasi untuk pembinaan anggota paguron pencak silat tersebut.



Dipl.Ing. Hj. **DAIH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Tetaplah bangga dan mencintai pencak silat ini sebagai perwujudan cinta kita kepada Indonesia. Apalagi pencak silat ini sudah dipertandingkan dalam even-even resmi kompetisi olah raga tingkat dunia. Mudah-mudahan anak-anak dan para pemuda di paguron ini bisa berprestasi bagi Indonesia lewat pencak silat ini,"



Tutup Diklat Pemuda Pancasila, HNW Ingatkan Integritas Pancasila Demi Jayanya NKRI

KUTIPAN

Jakarta (22/08) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid didaulat menjadi warga kehormatan oleh Pimpinan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan

dengan dipakaikankan jaket Pemuda Pancasila, dan diminta untuk menutup kegiatan diklat kaderisasi kualifikasi madya Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan yang bertempat di Batalyon Komando 461 Paskhas Halim Perdana Kusumah, Jakarta (21/08/2022).

Dalam sambutannya pria yang akrab disapa HNW ini menekankan pentingnya integritas dalam pengamalan Pancasila, dan agar menjadikan Pancasila sesuai fitrahnya sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa, bukan alat untuk memecah-belah.

"Sekalipun ada beragam peristiwa yang terjadi dari tahun 1945 hingga sekarang, tapi kita mampu tetap bersatu dan NKRI

tetap terjaga. Karena kita memiliki ideologi yang muncul dari budaya bangsa sendiri yang disepakati dan dirawat bersama oleh bapak dan ibu bangsa dari berbagai latarbelakang yang sangat majemuk, yakni Pancasila," disampaikan Hidayat kepada kader-kader Pemuda Pancasila di Jakarta, Ahad (21/08/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, di era modern ini ada dua negara yaitu Uni Sovyet dan Yugoslavia yang gagal mempertahankan eksistensinya dan itu patut jadi pelajaran agar tak terulang ke Indonesia.

Uni Soviet telah bubar karena tidak memiliki kesepakatan basis ideologi yang muncul dari budaya bangsa sendiri,

yang disepakati dan mampu mengikat secara sukarela semua kelompok bangsa di dalamnya, yaitu Komunisme. Sementara Yugoslavia telah pecah karena persatuan federasinya dibasiskan pada ketokohan Bapak Bangsa, sehingga ketika dia meninggal maka pengikat di antara negara-negara bagiannya pun menjadi sangat rapuh dan tidak mampu menjaga kelanjutan Yugoslavia sbg negara federasi.

"Di saat yang sama, kita memiliki ideologi Pancasila yang merupakan ideologi yg digali dari budaya bangsa sendiri dan disepakati oleh bapak ibu bangsa dari latarbelakang yg beragam, dan Pancasila yang bahkan Bung Karno tidak mengklaim sebagai penemunya sehingga beliau mudah menerima hasil musyawarah dalam Panitia 9 maupun PPKI yang tidak sepenuhnya seperti yang beliau pidatikan pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUK. Karenanya Pancasila bukanlah ideologi yang mengukultuskan Bapak Bangsa, melainkan sebagai hasil pemikiran bersama seluruh



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Sejarah pembentukan dan menyepakati Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan dan menyelamatkan bangsa dan negara, telah mengajarkan kita untuk mengedepankan sikap bergotong-royong, bekerjasama, saling menghormati, berbuat baik, menyumbangkan pemikiran jernih, serta berani untuk mendengar, menerima, dan menyepakati yang terbaik

bapak ibu bangsa Indonesia sendiri, sehingga kini terus hidup dan terus disepakati, sehingga Indonesia terus bisa eksis dan terintegrasi sampai

masa yang akan datang," lanjutnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Terkait Kelulusan Beasiswa Pendidikan S3 On-going, Aleg PKS: Penjelasannya Harus Rasional dan Transparan

KUTIPAN

Jakarta (30/08) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menerima aspirasi dari Perkumpulan Dosen Pendaftar Beasiswa Dalam Negeri On-going di Ruang Meeting Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi (30/08).

Aspirasi berupa permohonan dukungan kelulusan beasiswa pendidikan S3 on-going bagi dosen.

"Saya melihat ada 22 poin aspirasi. Diharapkan (aspirasi) ini bisa mendukung dosen agar bisa diikutsertakan sebagai penerima beasiswa," terang Abdul Fikri sebagai pembuka.

"Sumbatan-sumbatan ini harus dibuka. Jika (dosen) tidak bisa mendaftar beasiswa, maka jelaskan penyebabnya secara rasional dan transparan," lanjutnya.

Yogie Prawira, salah satu perwakilan delegasi dari Universitas Padjajaran, menuturkan

bahwa terdapat diskriminasi dari adanya aturan on-going dari Kemdikbudristek.

"Peraturan on-going hanya memperbolehkan peserta pendaftar dari mahasiswa semester 1 atau yang menuju semester 2, sedangkan dosen-dosen sudah masuk semester 3. Kenapa tiba-tiba berubah dan tidak ada sosialisasi?" tegas Yogie.

Para aspirator merasakan banyak kejanggalan yang meliputi perubahan regulasi secara cepat dan penyertaan surat anti narkoba yang kolomnya muncul setelah pendaftaran sudah diselesaikan, sehingga menyebabkan 166 orang tidak

terakomodir.

Irtan, selaku ketua pagu aspirasi, berharap agar Abdul Fikri dapat menyampaikan seluruh aspirasi timnya kepada pihak-pihak terkait.

Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Perkumpulan Dosen ini. Baginya, melanjutkan pendidikan S3 bukan sekadar memenuhi tuntutan akademis dan institusi, melainkan komitmen untuk berkhidmat sebagai tenaga pendidik, khususnya dosen.

"Masalah ini perlu dilaporkan kepada Ombudsman agar ada respons jelas.

Kemudian, harus ada dialog dengan Kemenkeu yang menaungi LPDP karena BPI bekerja sama dengannya. Dialog dengan Kemdikbudristek akan saya fasilitasi melalui Pak Kahar," tegas Abdul Fikri.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Masalah ini perlu dilaporkan kepada Ombudsman agar ada respons jelas. Kemudian, harus ada dialog dengan Kemenkeu yang menaungi LPDP karena BPI bekerja sama dengannya. Dialog dengan Kemdikbudristek akan saya fasilitasi melalui Pak Kahar,"





Terima Aspirasi Ikatan Dosen PTN Non-PNS, Aleg PKS Siap Dukung Perbaikan Haknya

KUTIPAN

Jakarta (23/08) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, menerima aspirasi dari Ikatan Dosen PTN Non-PNS seluruh Indonesia terkait dengan tuntutan mereka terhadap peningkatan kesejahteraan dosen.

Hal ini disampaikan pada pro-Zgram Hari Aspirasi Rakyat FPKS DPR RI, pada Selasa (23/08).

Pada kesempatannya, Ketua Ikatan Dosen PTN Non-PNS, Muhammad Nur Afandi, menyampaikan beberapa keluhan yang sampai saat ini masih dirasakan oleh para dosen non-PNS.

Terutama terkait tuntutan permohonan pengangkatan menjadi PPPK dan keberadaan Undang-Undang KSN yang sampai saat ini implementasinya dirasa belum sesuai.

"UU KSN selalu menjadi perhatian kami, sampai saat ini yang diakui sebagai KSN hanya dua yakni apabila ia seorang PNS dan PPPK. Sehingga, yang

kami pertanyakan adalah kami sebagai non-PNS ini dikemakan sebenarnya?," pungkaskah afandi.

"Kami diangkat oleh pemerintah tapi dengan adanya Undang-Undang tersebut kami juga seakan dicampakkan," tambahny.

Perwakilan lain juga menambahkan bahwa pada realitasnya kontribusi dari para dosen non-PNS juga memang tidak bisa diabaikan. Dosen non-PNS banyak diberdayakan terutama dalam mengangkat kualitas kampus khususnya ketika proses penilaian akreditasi kampus.

"Tugas kami sama dengan dosen Tri Dharma lainnya. Justru kami merasa seringkali

lebih banyak diberdayakan. Oleh sebab itu memang sudah saatnya kami layak pula untuk di perhatikan dalam konteks apapun." ungkap salah satu anggota Ikatan Dosen PTN Non-PNS.

Tak hanya itu, mereka mengungkapkan bahwa persoalan akan kebutuhan finansial dan hak-hak pokok pendidik memang masih menjadi persoalan utama. Ikatan Dosen PTN Non-PNS berharap bahwa setidaknya apa yang pernah dijanjikan bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang dijanjikan.

"Masalah gaji memang masih menjadi persoalan. Pernah dijanjikan akan mendapat hak yang setara dengan PNS kecuali terkait gaji pensiun, akan tetapi hal itu masih terus kami nantikan." pungkaskah.

"Paling tidak harapan kami, kita ada finansial yang sama dengan PNS maupun PPPK. Kita sampai sekarang seakan hanya menjadi pendengar sejati yang hanya mengandalkan gaji pokok kami saja." sedikit menambahkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

"Persoalan hak dan kesejahteraan yang diterima oleh para dosen non-PNS memang saya akui masih belum sesuai. Saya juga selalu sampaikan bahwa dalam pendidikan kita, yang perlu untuk terus diberdayakan dan diperjuangkan adalah hak dari para tenaga pendidik.



Legislator PKS Ajak Generasi Muda **Kembangkan** **Pariwisata** di Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (23/08) --- Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PKS Ledia Hanifa, menerima aspirasi dari HMPI (Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia) dalam program Hari Aspirasi Rakyat di Ruang Meeting FPKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/08).

Dalam kesempatan itu, Ledia memberikan semangat kepada generasi muda untuk giat belajar guna mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia.

"Kita perlu menyeimbangkan pariwisata dalam konteks wisata alam, belanja, olahraga, kuliner, dan ekonomi kreatif. Generasi muda tentu menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari proses ini", ungkap Sekertaris Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Menurut Ledia, kehadiran HMPI menjadi secerah harapan guna menjadi wadah

bagi generasi muda mahasiswa pariwisata di Indonesia.

"Hadirnya organisasi ini sangat baik karena bertujuan sebagai komunikasi untuk mengembangkan kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan", pungkasnya.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

"Kita perlu menyeimbangkan pariwisata dalam konteks wisata alam, belanja, olahraga, kuliner, dan ekonomi kreatif. Generasi muda tentu menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari proses ini, kehadiran HMPI menjadi secerah harapan guna menjadi wadah bagi generasi muda mahasiswa pariwisata di Indonesia."





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

EVENT

fraksi.pks.id | Rabu 31 Agustus 2022

Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi 2022, Presiden PKS Ingatkan Sejarah Kemerdekaan Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Presiden PKS, Ahmad Syaikh, menjadi keynote speech dalam Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno 2022.

Ahmad Syaikh berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali suasana kemerdekaan Indonesia sehingga memunculkan semangat inspirasi dan ikut dalam suasana kebatinan founding fathers Bangsa Indonesia.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk kita semua, mengingat kembali suasana di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga muncul semangat, inspirasi agar kita ikut serta di dalam suasana kebatinan para founding fathers kita. Sehingga ingin memiliki tekad yang kuat bagaimana merealisasikan cita-cita kemerdekaan mereka, dan kita bisa memberikan kontribusi



kontribusi besar apa yang kita miliki untuk bangsa ini pada masa yang akan datang," jelas Syaikh.

Ahmad Syaikh mengapresiasi Ketua Fraksi dan seluruh jajaran dan seluruh panitia yang telah menginisiasi dan mengelat kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya sejarah bangsa.

"Sehingga betul apa yang sering diingatkan Ir. Soekarno yakni Jas Merah 'Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah'.

Namun kita juga perlu mengenang bahwa pejuang di awal kemerdekaan banyak di antaranya berasal dari para tokoh ulama dan Habaib sehingga wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid sering mengingatkan istilah Jas Hijau 'Jangan Sekali-Kali Melupakan Jasa Ulama' kemarin dalam diskusi juga ada istilah Jas Muda 'Jangan sekali-kali Meninggalkan Peran pemuda,' ungap Presiden PKS

Ahmad Syaikh menuturkan bahwa lomba ini sesungguhnya mengingatkan kita semua bahwa berbagai kalangan dapat berkontribusi besar untuk memerdekakan negeri kita ini. Saat negeri ini merdeka, berbagai kalangan juga harus memberikan kontribusi untuk mengisi tujuan dan mencapai cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan founding fathers.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. AHMAD SYAIKHU Presiden PKS

'Lomba ini akan membangkitkan kembali semangat generasi muda terhadap jejak para pendiri bangsa, kita warisi semangat mereka yang pantang menyerah seraya terus mengembangkan keterampilan dan keahlian kita di berbagai bidang yang diperlukan untuk memajukan Bangsa Indonesia, mari syukuri nikmat kemerdekaan dengan menguatkan integrasi kita, saling bersinergi membangun bangsa dari berbagai elemen

EVENT

fraksi.pks.id | Ahad 28 Agustus 2022

Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi, Fraksi PKS Ingin Anak Muda Lanjutkan Estafet Kepemimpinan yang Satukan Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Grand Final Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Soekarno Session ke-5 Tahun 2022.

Acara yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT RI ke-77 ini mengangkat tema 'Saatnya Menjadi Proklamator Muda Indonesia', diikuti oleh finalis dari 20 Provinsi se-Indonesia.

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyampaikan pidato kebangsaan yang membakar semangat para Grand Finalis dan audience yang hadir. Ada dua pesan kebangsaan yang disampaikan Dr. Salim.

"Pertama, jadikan proklamasi kemerdekaan sebagai ikrar kebangsaan untuk terus menjaga dan memajukan Indonesia. Indonesia memang telah merdeka, tapi tidak pernah berhenti berjuang. Anak muda



harus menjadi pejuang-pejuang masa kini dalam berbagai bidang," ungkap Dr. Salim.

Pesan kedua yang beliau sampaikan, jadikan proklamator, para pejuang, dan pendiri republik sebagai teladan dalam mengisi peran-peran pembangunan saat ini.

"Tiga karakter yang menonjol dari proklamator dan pendiri bangsa kita, pertama sebagai tokoh pemersatu bangsa. Kedua, sebagai tokoh dengan jiwa dan pemikiran yang

bersahaja dan sederhana. Ketiga, sebagai tokoh yang melakukan perubahan besar bagi bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berpesan agar generasi muda mewarisi jiwa, pemikiran dan semangat tersebut. Jadilah proklamator muda Indonesia. Anak muda adalah generasi emas Indonesia yang harus mengambil peran-peran kepemimpinan karena anak muda selalu mengambil peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhul, dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi Fraksi PKS dalam membangkitkan semangat nasionalisme melalui berbagai event dan lomba-lomba kebangsaan.

"Hal ini membuktikan bahwa PKS selalu terdepan dalam menjaga NKRI dengan selalu mengingatkan pesan kebangsaan dari proklamator dan para pendiri bangsa. Jas Merah, kata Bung Karno. Ja-

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Generasi muda adalah masa depan bangsa Indonesia yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional. Mengambil teladan dari proklamator kita, generasi muda harus menjadi pemimpin yang menyatukan bangsa dan bukan yang memecah belah, menebar hoaks dan fitnah, untuk mengambil keuntungan pribadi"

ngan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ada juga pesan lain, Jas Hijau, jasa-jernih melupakan jasa-jasa ulama. Selain itu, ada Jas Muda,

jangn pula melupakan jasa pemuda dalam sejarah bangsa," ungkap Syaikhul. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Soal Filantropi, HNW: Semua Pihak Harus Amanah, Taati Aturan, agar Tak Jadi Musibah

KUTIPAN

Jakarta (25/08) --- Anggota Komisi VIII DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan soal filantropi dan pentingnya prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada dalam kegiatan dan pengelolaan lembaga filantropi.

Prinsip-prinsip tersebut, kata Hidayat, sangatlah diperlukan agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang disangkakan kepada lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Kasus yang disangkakan kepada ACT ini menjadi kritik dan pelajaran yang sangat berharga buat semua pihak termasuk lembaga-lembaga filantropi sejenis lainnya, agar menjalankan prinsip-prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada. Agar jangan salah langkah, akhirnya jadi fitnah, dan merugikan nama baik lembaga filantropi, mencederai

kepercayaan donatur dan merugikan warga penerima manfaat," kata Hidayat Nur Wahid ketika menerima pengurus Yayasan Wihdatul Ummah periode 2022-2027, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks MPR/DPR/ DPD, Jakarta, Rabu (24/08/2022).

Pengurus Yayasan Wihdatul Ummah Jakarta Selatan, dipimpin oleh Ishaq Maulana (Ketua Yayasan) dan didampingi beberapa pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu, Ishaq Maulana menyampaikan program kerja Yayasan Wihdatul Ummah. Salah satunya adalah

meng-upgrade yayasan ini untuk juga menjadi lembaga amil zakat.

Sejak berdiri pada tahun 2016, Yayasan Wihdatul Ummah yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, belum menjadi lembaga amil zakat.

Saat ini Yayasan Wihdatul Ummah sedang memproses dengan melengkapi persyaratan dan dokumen untuk menjadi lembaga amil zakat.

"Kami ingin meluaskan kinerja Yayasan dengan meng-upgrade agar juga menjadi lembaga amil zakat," tutur Ishaq Maulana.

Tetapi Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar upaya Yayasan Wihdatul Ummah untuk meng-upgrade diri menjadi lembaga amil zakat harus benar-benar dilakukan secara profesional dan amanah serta taat hukum agar lembaga filantropi benar-benar membawa manfaat bagi Rakyat dan tidak terulang lagi kasus seperti yang disangkakan kepada ACT.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kasus yang disangkakan kepada ACT ini menjadi kritik dan pelajaran yang sangat berharga buat semua pihak termasuk lembaga-lembaga filantropi sejenis lainnya, agar menjalankan prinsip-prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada. Agar jangan salah langkah, akhirnya jadi fitnah, dan merugikan nama baik lembaga filantropi, mencederai kepercayaan donatur dan merugikan warga penerima manfaat



*Turut
Berduka
Cita*



PKS

Turut Berduka
Atas Wafatnya Ananda

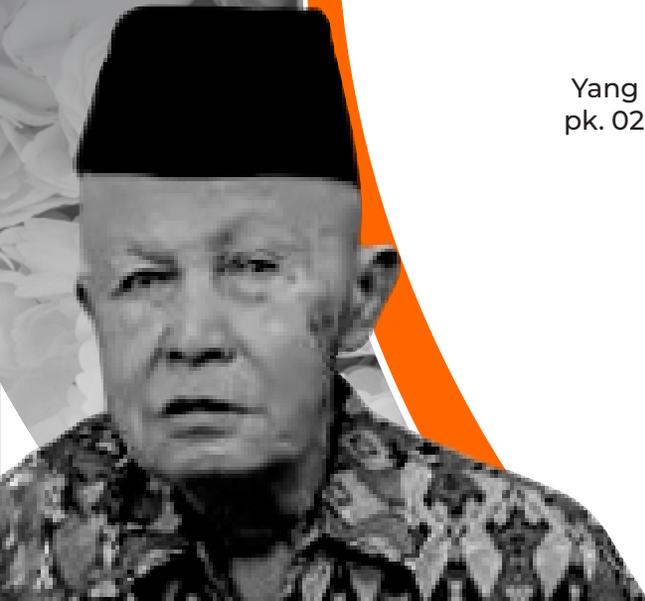
Bapak Mardanis Sutan Tanameh

Ayahanda Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi Ansharullah

Yang wafat pada Selasa 6 September 2022
pk. 02.43 WIB di RSAM Bukittinggi Sumbar.

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI





Syaikhu Tegaskan PKS Tolak Rencana Kenaikan BBM

KUTIPAN

Jakarta (01/09) — Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Syaikhu menegaskan, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya!" tegas Syaikhu.

Menurut Syaikhu lagi, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat

lainnya akan menjerit.

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," tegas Syaikhu.

Kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Ditambah lagi, saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan.

Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng

melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.

Syaikhu menjelaskan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," tegas Syaikhu.

Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" kata Syaikhu lagi.

Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?"

sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial

selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***